

**DETERMINAN PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Destya Winda Kholifah

No. Mahasiswa: 15312485

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**DETERMINAN PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Destya Winda Kholifah

No. Mahasiswa: 15312485

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Penulis,



Destya Winda Kholifah
Destya Winda Kholifah

**DETERMINAN PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Destya Winda Kholifah

No. Mahasiswa: 15312485

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Desember 2018

Dosen Pembimbing



Arief Rahmany, SIP., S.E., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN PRAKTIK INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM WEBSITE
PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN
2016&2017)**

Disusun Oleh : **DESTYA WINDA KHOLIFAH**
Nomor Mahasiswa : **15312485**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Jum'at, tanggal: 18 Januari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Jadilah orang yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab”

Joko Hajiwo, Bapak penulis tercinta

“Motivasi saja tidak cukup, yang kita perlukan adalah strategi untuk membaca where we are dan where we are going to”

Rhenald Kasali, Disruption

“Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim”

Q.S. Al-Anbiyaa’: 87

“.....Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu”

Q.S. Ali-Imran: 26

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Joko Hajiwo dan **Sri Martiniyah** yang tidak henti-hentinya memberikan rasa kasih sayang dan segala doa sehingga skripsi ini bisa selesai dan lulus sesuai harapan. Semoga dengan skripsi ini menjadi harapan baru di masa depan.

Adek yang saya sayangi,

Agnifa Isna Hafizha

Aldhi Putra Ramadhan

Semoga apa yang baik dalam diri saya bisa dijadikan tauladan

Keluarga serta sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan doa untuk menjadi pribadi yang lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin. Penelitian berjudul "***Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) dalam Website Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)***" disusun untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu memberikan ketentraman hati, kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar. *Laa haula wa laa quwwata illa billah.*
2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah memberikan syafaatnya kepada penulis dan sebagai suri tauladan di muka bumi untuk membimbing umatnya dari gelapnya kebodohan menuju cahaya yang terang saat ini.

3. Bapak **Joko Hajiwo** dan Ibu **Sri Martiniyah**, sebagai orangtua penulis yang selalu bekerja keras dalam memberikan kasih sayang, doa dan dukungan pendidikan yang luar biasa hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak **Dwipraptono Agus Harjito, Dr., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia periode 2014–2018 yang telah mendukung penyelesaian studi.
5. Bapak **Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
6. Bapak **Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS), Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia periode 2014–2018 yang telah mendukung penyelesaian studi.
7. Bapak **Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
8. Bapak **Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan saran yang terbaik dalam proses menyelesaikan skripsi ditengah kesibukan beliau sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Ibu **Reny Lia Riantika, S.E., Ak., M.Acc.**, selaku Dosen yang selalu memberikan motivasi dan saran yang terbaik dalam proses menyelesaikan skripsi di samping saya menjadi asisten tutorial beliau.
10. Ibu **Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).**, selaku Dosen yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pengalaman untuk memotivasi saya dalam penyelesaian studi di samping saya menjadi asisten tutorial beliau.

11. **Agnifa Isna Haifzha dan Aldhi Putra Ramadhan**, kedua adik saya yang saya banggakan dan telah menjadi pelipur lara penulis dalam menyelesaikan proses penyelesaian studi.
12. **Ayu Nailil Kiromah, Annisa, Intan Oktaria dan Viola Argi Candra Dewi**, sahabat-sahabat yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan penulis selama proses menyelesaikan studi. Terima kasih atas saran, dukungan dan doa selama ini semoga kita dapat menjadi wanita yang mandiri dalam mencapai tujuan hidup di masa depan.
13. **Karina Melinda Sari**, teman seperjuangan dalam penyelesaian studi dan teman bimbingan skripsi yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis, terima kasih telah berbagi cerita, ilmu dan pengalaman.
14. **KSPM FE UII**, periode 2016/2017 dan periode 2017/2018 yang telah mengajarkan penulis arti kerjasama tim dan pengalaman organisasi. Kakak angkatan 2013 dan 2014 yang telah membimbing dan mengayomi dalam memberikan ilmu dan pengalaman.
15. **BPA SCC UII**, Departemen Administrasi dan Keuangan periode 2018 yang telah mengajarkan penulis dalam mengaplikasikan ilmu Akuntansi di dunia kerja, walaupun karena suatu alasan penulis tidak dapat bergabung dalam satu periode penuh.
16. **Keluarga KKN 57 Unit 154**, Dusun Dompok, Daleman Kidul, Pakis, Magelang. Keluarga Ibu **Ribet Istiana** dan teman-teman seperjuangan **Rizky, Aldo, Fahmi, Dina, Linda dan Amira**. Terima kasih telah mengajarkan banyak pelajaran hidup tentang arti keluarga dan kesederhanaan.

17. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam penyelesaian studi.

18. Seluruh keluarga, sahabat dan teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Penulis,

Destya Winda Kholifah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran	xvi
Abstract	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2. Teori <i>Signaling</i>	15
2.1.3. Teori Institusional.....	15
2.1.4. <i>E-Government</i>	16
2.1.5. Akuntabilitas dan Transparansi	18
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.3. Hipotesis Penelitian	27
2.3.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam <i>Website</i> Permerintah Daerah.....	27
2.3.2. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Praktik <i>Internet Financial</i> <i>Reporting</i> dalam <i>Website</i> Permerintah Daerah.....	29

2.3.3. Pengaruh Umur Administratif Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam Website Permerintah Daerah.....	31
2.3.4. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam Website Permerintah Daerah.....	32
2.3.5. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam Website Permerintah Daerah.....	33
2.3.6. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam Website Permerintah Daerah	34
2.3.7. Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> dalam Website Permerintah Daerah	35
2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	38
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3. Variabel Penelitian	39
3.3.1. Variabel Dependen	39
3.3.2. Variabel Independen.....	40
3.4. Metode Analisis Data	43
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	43
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	44
3.4.3. Analisis Regresi Berganda.....	46
3.4.4. Pengujian Hipotesis	47
3.5. Hipotesa Operasional.....	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	51
4.2. Statistik Deskriptif.....	51
4.3. Uji Asumsi Klasik	55
4.3.1. Uji Multikolinearitas.....	55
4.3.2. Uji Autokorelasi	55
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	57
4.3.4. Uji Normalitas	57
4.4. Analisis Regresi Linear Berganda	59
4.5. Pengujian Hipotesis	62

4.5.1. Koefisien Determinasi	62
4.5.2. Uji t	62
4.6. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Keterbatasan Penelitian	78
5.3. Implikasi Penelitian	78
5.4. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerapan <i>Internet Financial Reporting</i> Pemda 2018.....	2
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	51
Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Durbin-Watson.....	56
Tabel 4.5 Uji Run Test.....	56
Tabel 4.6 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	59
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	37
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	57
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas	58
Gambar 4.3 Grafik Plot Linier Uji Normalitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengukuran Variabel Penelitian	84
Lampiran 2 : Indeks Praktik <i>Internet Financial Reporting</i>	85
Lampiran 3 : Skoring Indeks <i>Internet Financial Reporting</i>	87
Lampiran 4 : Daftar Data Variabel Dependen dan Independen	99
Lampiran 5 : Hasil Uji Statistik SPSS	106

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of audit opinion, administrative age, type of local government, level of dependency, population, human development index, and level of regional prosperity on internet financial reporting practices in Indonesian local government for the year of 2016-2017. The number of samples used in the study as many as 67 local government website is calculated based on purposive sampling. Types of data are collected using secondary data. This study uses a quantitative approach to the data analysis method and hypothesis testing use descriptive statistic analysis and multiple regression analysis. The results of the observations were processed using SPSS Statistics 25. The results of this research suggest that administrative age have a positive effect on the practice of internet financial reporting in Indonesian local government. Meanwhile, audit opinion, type of local government, level of dependency, population, human development index, level of regional prosperity has no effect against internet financial reporting practices in Indonesian local government website.

Keywords: *internet financial reporting, audit opinion, administrative age, type of local government, level of dependency, population, human development index, level of regional prosperity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kesejahteraan daerah pada praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah di Indonesia tahun 2016-2017. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 *website* pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan *purposive sampling*. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil observasi diolah menggunakan *SPSS Statistic 25*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, opini audit, tipe pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci : *internet financial reporting*, opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kesejahteraan daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran informasi keuangan melalui media internet (*Internet Financial Reporting-IFR*) telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada para *stakeholdernya*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* terkait. Praktik IFR didorong dengan adanya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa adanya penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah serta setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Styles & Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online. *Internet Financial*

Reporting melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua pemangku kepentingan publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat (Verawaty, 2015).

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah juga telah didorong untuk membangun situs Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010. Namun demikian, implementasi atas instruksi tersebut belum maksimal dan peraturan tersebut telah diubah sesuai perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan saat ini menjadi Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terdapat tiga jenis informasi yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah, yaitu informasi secara berkala (termasuk di dalamnya laporan keuangan pemerintah daerah), serta merta dan setiap saat.

Tabel 1.1. Penerapan *Internet Financial Reporting* Pemda 2018

No.	Pemerintah Daerah	Derah Otonom	Tidak Memiliki Website	Perbaikan Website	Tidak Memiliki Menu TPAD	Memiliki Menu TPAD
1	Provinsi	34	0	1	2	31
2	Kota	93	0	3	36	54

Tabel 1.1. Penerapan *Internet Financial Reporting* Pemda 2018 (lanjutan)

No.	Pemerintah Daerah	Derah Otonom	Tidak Memiliki Website	Perbaikan Website	Tidak Memiliki Menu TPAD	Memiliki Menu TPAD
3	Kabupaten	415	7	24	230	154
	Jumlah	542	7	28	268	239
	Presentase	100%	1.29%	5.17%	49.45%	44.10%

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tanggal 17 sampai 31 Oktober 2018 (tabel 1.1) dapat disimpulkan bahwa 44.10% pemerintah daerah telah melakukan transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012, mayoritas pemda yang telah mengungkapkan konten TPAD secara lengkap dengan tahun anggaran terbaru berada di Pulau Jawa, diluar presentase tersebut terdapat 22 *website* pemda yang sudah membuat menu TPAD namun belum terdapat konten di dalamnya yakni, Kab.Kendal, Kab. Lamongan, Kab. Tulungagung, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Saby Raijua, Kab. Barito Selatan, Kab.Poso, Kab. Sigi, Kota Palu, Kab.Bantaeng, Kab.Bone, Kab.Luwu, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Takalar, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Seram Bagian Barat, Kota Tual, Kab. Merauke, Kab. Yahukimo, dan Kab. Sorong.

Namun demikian, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mayoritas pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan praktik IFR, dikarenakan pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) sebab belum adanya sanksi yang mengikat (Nosihana & Yaya, 2016). Sekretariat Nasional Fitra merilis Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget*

Survey) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2017 berada pada level 64 dari 100 poin, yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan survey dua tahun sebelumnya sebesar 59, setelah sempat turun pada 2012 sebesar 62 poin (<https://tirto.id>). Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 mencapai 54,68% angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan masyarakat akan pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Penerapan IFR diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang tengah menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah serta untuk menciptakan *good governance & clean governance*. Menurut *United Nation Development Program* dalam Madiasmo (2009) karakteristik pelaksanaan *good government* yakni, partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategik. Pelaporan merupakan salah satu tahap penting dalam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2011). Akuntabilitas publik dapat dilihat dari seberapa besar tanggung jawab pemerintah daerah kepada seluruh lapisan *stakeholdernya* terutama kepada masyarakat yang telah memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Dengan adanya praktik IFR di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan distribusi informasi secara merata pada seluruh lapisan *stakeholder* pemerintah daerah mengingat kendala luasnya kondisi geografis

Indonesia sehingga dapat meminimalkan adanya *asimetri informasi*. Pelaporan keuangan di internet (IFR) sebenarnya merupakan cara pemda agar terlegitimasi (Alhajjriana et al, 2017). Legitimasi merupakan sebuah persepsi atau asumsi pihak eksternal bahwa suatu organisasi telah berjalan sesuai norma, aturan, dan keyakinan yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995). Dapat diartikan dengan adanya praktik IFR dapat meyakinkan *stakeholder* pemerintah daerah terhadap kinerja yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Praktik pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi (*good governance & clean governance*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Namun demikian, menurut laporan *Corruption Perceptions Index 2017* Indonesia mendapat nilai 37 dari 100 poin dan menempati peringkat 96 dari 180 negara. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah di Indonesia belum mencerminkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Sedangkan menurut Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia oleh *Transparency International Indonesia 2017* dilakukan survey terhadap 12 kota besar di Indonesia dengan hasil Jakarta Utara sebagai kota terbersih dan Medan sebagai kota terkorup (www.kpk.go.id). Tindakan korupsi yang berlangsung dalam pemerintah daerah dapat menimbulkan krisis kepercayaan *stakeholder* pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam optimalisasi IFR sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Manfaat lain dari praktik IFR di lingkungan pemerintah daerah

yakni dapat meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan anggaran terhadap pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan.

Praktik IFR sebagai salah satu perwujudan *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan *good and clean governance*.

Penelitian mengenai determinan *Internet Financial Reporting* pada sektor pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Laswad et al. (2005) menemukan bahwa *leverage, press visibility, type of council* dan kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada Pemda di New Zealand. Styles & Tennyson (2007) menemukan bahwa ukuran daerah, kualitas *accounting disclosure*, pendapatan per kapita dan tingkat hutang berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di internet, sedangkan ukuran daerah, pendapatan per kapita, dan tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet pada *website* Pemda U.S. García & García-garcía (2010) menemukan bahwa ukuran Pemda, *capital investment*, kompetisi politik dan *press visibility* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela melalui internet pada Pemda di

Spainol. Di Indonesia, penelitian serupa telah dilakukan oleh Puspita & Martani (2012), Alhajjriana et al., (2017), Nosihana & Yaya (2016), Khasanah et al., (2017), Verawaty (2015), Rosita & Arifin (2017), Hanifah et al. (2017), Rahman et al. (2013), Ratmono (2013), Setyaningrum & Syafitri (2012), Hilmi & Martani (2012), Afryansyah & Haryanto (2013), dan Rahim & Martani (2016).

Dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan atas saran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada peneliti Verawaty (2015) yang berjudul *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia*, dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita dan ukuran hutang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menambahkan variabel opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan dan indeks pembangunan manusia.

Penambahan variabel opini audit karena pemerintah daerah yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI ingin menunjukkan sinyal kepada masyarakat bahwa kinerja pemerintahannya baik dengan cara menerbitkan laporan keuangannya di internet (Khasanah et al., 2017). Variabel tipe Pemda digunakan dengan alasan adanya perbedaan karakteristik pemerintah daerah kabupaten dan kota diprediksi akan memberikan tingkat pengungkapan yang berbeda pada *website* Pemda, tingkat akses internet daerah kota lebih tinggi daripada daerah kabupaten sehingga pemerintah daerah kota akan mengungkapan

informasi yang lebih besar pada *website* daripada pemerintah daerah kabupaten (Rahim & Martani, 2016).

Penggunaan variabel umur administratif dikarenakan semakin lama umur administratif pemerintah daerah diasumsikan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan dalam *websitenya* (Rosita & Arifin, 2017). Penambahan variabel tingkat ketergantungan dikarenakan Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) akan melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi dan memiliki pengungkapan rata-rata konten serta presentasi yang tinggi pada *website* Pemda tersebut karena adanya pengawasan yang lebih dari pemerintah pusat (Puspita & Martani, 2012). Peneliti juga menambahkan variabel indeks pembangunan manusia karena tingginya nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih rinci sebagai perwujudan bahwa pemerintah daerah juga memperhatikan tuntutan dan kepentingan masyarakat (Hanifah et al., 2017).

Peneliti tidak menggunakan variabel tingkat hutang dikarenakan penelitian mengenai pengaruh tingkat hutang dengan praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah hasil penelitiannya selalu konsisten memberikan pengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016), Khasanah et al. (2017), Verawaty (2015), Rosita & Arifin (2017), Hanifah et al. (2017), Ratmono (2013),

García & García-garcía (2010), Laswad et al. (2005) dan Styles & Tennyson (2007). Penggunaan periode pemerintahan tahun 2016-2017 karena peneliti ingin mengetahui perkembangan keadaan terbaru semenjak implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui tren perkembangan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*internet financial reporting*)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?
2. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?
3. Apakah umur administratif berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?
4. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?

5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?
6. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR)?
7. Apakah tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah variabel opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar penelitian selanjutnya baik bagi mahasiswa maupun pihak akademisi yang lain pada bidang akuntansi sektor publik.
2. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan bahan evaluasi mengenai kinerja terutama transparansi dan akuntabilitas publik dalam menciptakan *good governance* dan *clean governance* melalui pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Serta memberikan

masukan bagi regulator untuk membentuk regulasi mengenai *internet financial reporting* pada pemerintah daerah di Indonesia.

3. Bagi *Stakeholder* Pemda, masyarakat sebagai *stakeholder* utama pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui media internet. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh lapisan *stakeholder* pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan Pemda.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka dalam penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, yakni berupa populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang perhitungan dalam penelitian, meliputi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel yang ada serta alat analisis yang diperlukan. Dalam bab ini juga akan diperoleh hasil dan kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul dengan cara salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Penerapannya pada bidang sektor publik, dapat dikatakan pemerintah sebagai *agent* sedangkan masyarakat sebagai *principal*. Masyarakat menyerahkan mandat kepada pemerintah dan pemerintah berkewajiban melaporkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan *agency problem* berupa asimetri informasi, dimana terdapat ketimpangan penguasaan informasi. Artinya, terdapat satu pihak yang surplus (pemerintah) informasi sedangkan pihak lain (masyarakat) defisit informasi. Menurut Eisenhardt (1989), terdapat tiga asumsi yang menjadi dasar teori keagenan yaitu:

- i. Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*),

- ii. Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen,
- iii. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Ketiga asumsi tersebut menimbulkan asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik, yakni mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa (*self-interest*) serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan informasi yang dimilikinya (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Menurut Jensen & Meckling (1976), untuk mengoptimalkan setiap pengambilan keputusan akibat adanya hubungan keagenan terdapat tiga jenis biaya yang muncul. (i) *Monitoring cost*, yakni biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*. Pemerintah sebagai *agent* juga akan mengeluarkan (ii) *bonding cost*, yakni biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Serta timbulnya (iii) *residual loss* berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Dengan adanya publikasi pengelolaan keuangan melalui internet dapat menghindarkan masalah asimetri informasi, meminimalkan *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss* serta dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas publik sesuai karakteristik *good and clean governance*.

2.1.2. Teori Signaling

Teori *signalling* dalam konteks sektor publik yang dikembangkan oleh Evans dan Patton (1987) dalam Verawaty (2015) menjelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Laporan keuangan yang dipublikasikan dapat menjadikan sarana pemerintah untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat agar masyarakat dapat terus mendukung jalannya pemerintahan secara optimal. Faktor asimetri informasi antara pemerintah dengan *stakeholder* publik, mendorong pemerintah untuk melaporkan kinerjanya termasuk pelaporan keuangan yang memadai salah satunya dengan melakukan praktik *internet financial reporting* (IFR).

2.1.3. Teori Institusional

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), teori institusional menjelaskan bahwa organisasi merespon adanya tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka. Respon tersebut dapat berupa adopsi praktik-praktik atau struktur yang dapat diterima secara sosial sebagai pilihan organisasi dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional (*stakeholder*) mereka. Organisasi mengadopsi praktik-praktik atau struktur dalam rangka memperoleh legitimasi melalui 2 mekanisme yakni,

- i. *Decoupling*, adanya tekanan luar bisa dari para *stakeholder* sehingga organisasi melakukan tindakan manipulasi atau kebohongan,

- ii. *Isomorphism*, dibagi melalui 3 mekanisme yaitu, (i) *coercive isomorphism* (menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan *stakeholder* yang lebih luas), (ii) *mimetic isomorphism* (peniruan sebuah organisasi oleh organisasi lain yang telah terlegitimasi), dan (iii) *normative isomorphism* (adanya tuntutan profesional dalam organisasi).

Praktik *internet financial reporting*, menurut teori institusional dapat dipandang sebagai suatu adopsi praktik-praktik yang dapat diterima secara sosial dalam rangka memperoleh legitimasi dari *stakeholder* pemerintah daerah bahwa Pemda mempunyai kemampuan dan komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah (Ratmono, 2013).

2.1.4. E-Government

Inisiasi pengembangan *e-government* dilakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Dengan *e-government* pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.

Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Permenkominfo Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang penggunaan nama domain *go.id* untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah. Dilanjutkan dengan terbitnya dokumen cetak biru (*blueprint*) sistem aplikasi *e-government* bagi lembaga pemerintah daerah oleh

Kemenkominfo RI. Dalam *blueprint* tersebut dijelaskan mengenai pengembangan *e-government* yang dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yakni:

- a. Tingkat 1: Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi (*website*) di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses internet
- b. Tingkat 2: Pematangan, yang meliputi pembuatan situs informasi (*website*) publik secara interaktif dan terhubung dengan lembaga lain
- c. Tingkat 3: Pemantapan, yang meliputi pembuatan situs (*website*) transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
- d. Tingkat 4: Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *government to government* (G2G), *government to business* (G2B) dan *government to citizen* (G2C) terintegrasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan diseminasi informasi pemerintah daerah seperti media *website*, minimal dilakukan *updating* setiap hari. Penerapan *e-government* juga didorong dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Kementerian Dalam Negeri RI merilis data mengenai jumlah domain situs

Pemda yaitu sebanyak 518 *website* dari total 539 daerah otonom dan 6 daerah administratif di Indonesia, tetapi tidak semua *website* tersebut dapat diakses (www.keuda.kemendagri.go.id).

2.1.5. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas publik dan transparansi merupakan indikator pelaksanaan *good governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahannya. Bentuk nyata dari akuntabilitas publik adalah pelaporan keuangan melalui internet (IFR). Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yakni: (i) akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi) dan (ii) akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada publik).

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi keuangan, pemerintah daerah harus mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yakni secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan di internet diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia secara efektif dan efisien.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul Penelitian	Sampel, Metode	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Puspita & Martani, 2012) Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda	108 Pemda di Indonesia Uji beda rata-rata, uji regresi berganda, dan analisis sensitivitas	Variabel Dependen Tingkat pengungkapan dalam <i>website</i> Pemda Variabel Independen 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Tingkat Ketergantungan 3. Ukuran Pemerintahan 4. Kompleksitas Pemerintahan 5. Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan 2. Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan 3. Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi, dan total pengungkapan 4. Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi pengungkapan.
2.	(Alhajjriana et al., 2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Internet Financial Reporting</i> Pemerintah Daerah dan	96 Pemda dari 32 provinsi dari tahun 2012-2014 di Indonesia. Analisis regresi	Variabel Dependen <i>Internet Financial Reporting</i> Pemda Variabel Independen 1. Pendapatan Daerah	1. Pendapatan daerah, jumlah anggota DPRD, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap IFR 2. Belanja daerah berpengaruh terhadap IFR

	Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	logistik dan logistik ordinal	2. Belanja Daerah 3. Jumlah Anggota DPRD 4. Jumlah Penduduk Variabel Intervening Akuntabilitas	3. IFR tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
3.	(Nosihana & Yaya, 2016) <i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	175 Pemda, 45 pemerintah kota dan 130 pemerintah kabupaten di Indonesia tahun 2014. Analisis regresi linear berganda	Variabel Dependen <i>Internet Financial Reporting</i> Variabel Independen 1. Kompetisi Politik 2. Ukuran Pemda 3. <i>Leverage</i> 4. Kekayaan Pemda 5. Tipe Pemda 6. Opini Audit	1. <i>Leverage</i> , kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap IFR 2. Kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap IFR
4.	(García & García-garcía, 2010) <i>Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities</i>	334 Pemda Spanyol Analisis regresi logistik ordinal dan regresi linear berganda	Variabel Dependen Pengungkapan informasi akuntansi sukarela di internet Variabel Independen 1. Ukuran Pemda 2. <i>Leverage</i>	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 2. Ukuran Pemda, <i>capital investment</i> , dan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela 3. <i>Press visibility</i> berpengaruh negatif terhadap

			<p>3. <i>Capital Investment</i></p> <p>4. Kompetisi Politik</p> <p>5. <i>Press Visibility</i></p>	<p>pengungkapan sukarela</p>
5.	<p>(Hanifah et al., 2017)</p> <p>Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, dan <i>Leverage</i> Terhadap Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah</p>	<p>51 pemerintah daerah di Indonesia</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah melalui <i>website</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>1. Kompetisi Politik</p> <p>2. Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>3. <i>Leverage</i></p>	<p>1. Kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah</p> <p>2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah</p> <p>3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah</p>
6.	<p>(Rahim & Martani, 2016)</p> <p>Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan</p>	<p>256 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia</p> <p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada <i>website</i> Pemda</p> <p>Variabel Independen</p> <p>1. Tingkat Akses Internet</p> <p>2. Kompetisi Politik</p>	<p>1. Tingkat akses internet, opini audit, usia daerah, jenis daerah, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada <i>website</i></p> <p>2. Tingkat akses internet, usia Pemda, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan</p>

	Non-Keuangan <i>Website</i> Pemerintah Daerah		3. Opini Audit 4. Usia Daerah 5. Kemampuan Keuangan Pemda 6. Tingkat Kemandirian Pemda 7. Jenis Daerah 8. Ukuran Daerah 9. Tingkat Pengangguran 10. Tingkat Kesejahteraan Daerah	informasi non- keuangan
7.	(Verawaty, 2015) Determinan Aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> Melalui <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah Di Indonesia	14 pemerintah provinsi dan 14 pemerintah kota/kabup aten di Indonesia tahun 2014 Analisis regresi linear berganda	Variabel Dependen <i>Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR)</i> Variabel Independen 1. Ukuran Pemda 2. Pendapatan per Kapita 3. Ukuran Hutang	1. Tidak terdapat hubungan positif antara ukuran Pemda, pendapatan per kapita dan ukuran hutang terhadap aksesibilitas IFR. 2. Karakteristik penduduk, kultur mendokumentasi, dan tekanan politisi menjadi pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam <i>e-government</i> .
8.	(Rosita & Arifin, 2017) Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam <i>Website</i>	156 Pemerintah daerah di Indonesia tahun 2014 Analisis regresi	Variabel Dependen Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda	1. Pendapatan per kapita, kekayaan daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda 2. Belanja daerah dan umur administratif berpengaruh positif

	Pemerintah Daerah	linear berganda	Variabel Independen 1. Belanja Daerah 2. Umur Administratif 3. Kekayaan Daerah 4. Pendapatan per Kapita 5. <i>Leverage</i> 6. Pendapatan Asli Daerah	terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah
9.	(Rahman et al., 2013) Determinan <i>Internet Financial Local Government Reporting</i> di Indonesia	173 pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia Analisis regresi linear berganda	Variabel Dependen <i>Internet Financial Local Government Reporting (IFGLR)</i> Variabel Independen 1. <i>Political Competition</i> 2. <i>Local Government Size</i> 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Local Government Wealth</i> 5. <i>Local Government Type</i>	1. <i>Size</i> dan <i>type</i> Pemda tidak terbukti berpengaruh terhadap IFGLR 2. <i>Leverage, local government wealth</i> dan <i>political competition</i> berpengaruh terhadap IFGLR
10.	(Styles & Tennyson, 2007) <i>The Accessibility of Financial Reporting of U.S.</i>	300 pemerintah daerah di USA	Variabel Dependen Ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan Di Internet	1. Ukuran daerah, kualitas <i>accounting disclosure</i> , pendapatan per kapita dan tingkat hutang berpengaruh terhadap ketersediaan

	<i>Municipalities On The Internet</i>	Analisis regresi linear berganda	Variabel Independen 1. Ukuran Daerah 2. Struktur Pemda 3. Kualitas <i>accounting disclosure</i> 4. Pendapatan per Kapita 5. Kondisi keuangan 6. Tingkat utang	laporan keuangan di internet. 2. Ukuran daerah, pendapatan per kapita, tingkat hutang dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet.
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--

Penelitian mengenai determinan praktik *internet financial reporting* dalam lingkungan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia penelitian terkait topik tersebut telah dilakukan antara lain oleh (Puspita & Martani, 2012), (Alhajjriana et al., 2017), (Nosihana & Yaya, 2016), (Khasanah et al., 2017), (Verawaty, 2015), (Rosita & Arifin, 2017), (Hanifah et al., 2017), (Rahman et al., 2013), (Ratmono, 2013), (Setyaningrum & Syafitri, 2012), (Hilmi & Martani, 2012), (Afryansyah & Haryanto, 2013), (Rahim & Martani, 2016), dan (Wau & Ratmono, 2015). Sementara di luar negeri (Laswad et al., 2005), (Styles & Tennyson, 2007), dan (García & García-garcía, 2010).

Melalui penelitian yang pernah dilakukan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *internet financial reporting* dan memiliki hasil yang inkonsisten dari beberapa peneliti. Faktor kompetisi politik oleh (Nosihana & Yaya, 2016), (Rahim & Martani, 2016), (Rahman et al., 2013) dan (García & García-garcía, 2010) menyatakan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap

praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Wau & Ratmono, 2015), (Alhajjriana et al., 2017), (Khasanah et al., 2017), (Hanifah et al., 2017), (Afryansyah & Haryanto, 2013) dan (Laswad et al., 2005) menyatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda. Faktor belanja daerah oleh (Ratmono, 2013), (Alhajjriana et al., 2017) dan (Rosita & Arifin, 2017) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Puspita & Martani, 2012) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor rasio pendapatan asli daerah oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012), (Hilmi & Martani, 2012), dan (Rahim & Martani, 2016) menyatakan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Puspita & Martani, 2012), (Nosihana & Yaya, 2016), (Alhajjriana et al., 2017), (Rosita & Arifin, 2017), (Ratmono, 2013), dan (Wau & Ratmono, 2015) menyatakan tidak berpengaruh.

Faktor rasio ketergantungan (Puspita & Martani, 2012) menyatakan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, (Ratmono, 2013) menyatakan tidak berpengaruh dan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan berpengaruh negatif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda. Faktor rasio kemandirian oleh (Wau & Ratmono, 2015) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Rahim & Martani, 2016) dan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor ukuran Pemda (jumlah asset) oleh (Khasanah et al., 2017), (Nosihana & Yaya, 2016), (Puspita & Martani, 2012), (Ratmono, 2013), dan (Wau & Ratmono, 2015) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda,

sedangkan (Afryansyah & Haryanto, 2013), (Hilmi & Martani, 2012), (Rahman et al., 2013), (Rosita & Arifin, 2017), dan (Laswad et al., 2005) menyimpulkan tidak berpengaruh. Faktor jumlah populasi oleh (Hilmi & Martani, 2012), (Puspita & Martani, 2012), (Rahim & Martani, 2016), (Styles & Tennyson, 2007) dan (García & García-garcía, 2010) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Afryansyah & Haryanto, 2013), (Alhajjriana et al., 2017), (Verawaty, 2015) dan (Ratmono, 2013) menyatakan tidak berpengaruh.

Faktor *leverage* (rasio pembiayaan utang) oleh (Hanifah et al., 2017), (Khasanah et al., 2017), (Rahman et al., 2013), (Rosita & Arifin, 2017) dan (Laswad et al., 2005) menyimpulkan berpengaruh negatif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Nosihana & Yaya, 2016), (Ratmono, 2013), (Verawaty, 2015), dan (García & García-garcía, 2010) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor tipe pemerintah daerah (kabupaten/kota) oleh (Rahim & Martani, 2016) dan (Laswad et al., 2005) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Nosihana & Yaya, 2016), (Rahman et al., 2013), dan (Ratmono, 2013) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor opini audit oleh (Hilmi & Martani, 2012), (Khasanah et al., 2017), (Rahim & Martani, 2016), (Wau & Ratmono, 2015) dan (Styles & Tennyson, 2007) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Nosihana & Yaya, 2016) dan (Ratmono, 2013) menyatakan tidak berpengaruh.

Faktor visibilitas media (tekanan media masa) oleh (Afryansyah & Haryanto, 2013) dan (García & García-garcía, 2010) menyimpulkan berpengaruh

negatif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, (Laswad et al., 2005) menyimpulkan berpengaruh positif, sedangkan (Khasanah et al., 2017) menyimpulkan tidak berpengaruh. Faktor pendapatan per kapita oleh (Rahim & Martani, 2016), (Wau & Ratmono, 2015) (Laswad et al., 2005) dan (Styles & Tennyson, 2007) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Verawaty, 2015) dan (Rosita & Arifin, 2017) menyimpulkan tidak berpengaruh. Faktor umur administrasi oleh (Rahim & Martani, 2016), (Rosita & Arifin, 2017) dan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda. Faktor indeks pembangunan manusia oleh (Hanifah et al., 2017) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda. Faktor diferensiasi fungsional (jumlah SKPD) oleh (Hilmi & Martani, 2012) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor tingkat investasi (García & García-garcía, 2010) menyimpulkan berpengaruh positif terhadap praktik IFR dalam *website* Pemda, sedangkan (Afryansyah & Haryanto, 2013) menyatakan tidak berpengaruh.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas publik atas laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah (LKPD) harus dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Sesuai UU Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI selaku pemeriksa mengeluarkan 4 (empat) jenis opini yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Ketika pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya mendorong pemerintah daerah melakukan praktik *internet financial reporting* pada *websitenya*, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa kepala daerah beserta jajarannya telah melakukan kinerja sesuai dengan kepatuhan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan penerapan efektivitas sistem pengendalian intern dengan baik.

Dengan mendasarkan pada teori institusional, *coercive isomorphism* dikarenakan adanya tekanan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan keuangan pemerintah wajib diaudit dengan opini dari BPK RI dan dilaporkan kepada DPR/D serta masyarakat luas. Dalam teori *agency*, peran BPK RI sebagai auditor pemerintah adalah mengurangi *agency problem* (adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*). Sejalan dengan teori *signaling*, jika pemerintah daerah mendapatkan opini WTP maka Pemda cenderung akan memberikan sinyal yang baik atas kinerjanya kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007) menunjukkan bahwa Pemda di Amerika Serikat yang menerima penghargaan dari GFOA cenderung menyajikan laporan keuangan di internet, selaras dengan penelitian

Khasanah et al. (2017) dan Rahim & Martani (2016) menunjukkan adanya hubungan positif antara opini audit terhadap praktik IFR di Indonesia. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) dan Ratmono (2013) tidak dapat menunjukkan hubungan keduanya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Opini audit berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.3.2. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa daerah otonom di Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni Pemerintah Provinsi sebagai Daerah tingkat I, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Daerah tingkat II dan Pemerintah Kecamatan sebagai Daerah tingkat III. Penelitian ini menggunakan daerah tingkat II, untuk membandingkan tipe pemerintah kabupaten dan kota dalam praktik *internet financial reporting*.

Kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi geografis maupun demografis. Kabupaten memiliki wilayah yang relatif lebih luas dan kepadatan penduduk lebih rendah daripada wilayah pemerintah kota. Daerah kota yang merupakan daerah urbanisasi relatif memiliki masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai serta tingkat pertumbuhan ekonomi dan akses internet yang tinggi

(Ratmono, 2013). Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota/kabupaten, yakni daerah urban 72,41%, daerah rural urban 49,49%, dan daerah rural 48,25%.

Dengan tingkat akses internet yang tinggi, akan mendorong pemerintah kota cenderung melakukan praktik *internet financial reporting* dan lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan dalam *websitenya*. Menurut BPS RI tahun 2017, masyarakat kota memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi (68,33%) daripada masyarakat kabupaten (66,20%). Berdasarkan teori institusional, *normative isomorphism* (pemerintah kota akan melakukan praktik IFR karena adanya tekanan dari pelaku profesional) dan *mimetic isomorphism* (pemerintah kota atau kabupaten akan meniru praktik IFR yang dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten yang lain yang sudah mendapatkan legitimasi publik).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahim & Martani (2016) tipe pemerintah daerah kota atau kabupaten memiliki pengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* di *website* pemerintah daerah, akan tetapi penelitian Nosihana & Yaya (2016), Rahman et al. (2013), dan Ratmono (2013) mengatakan hasil sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.3.3. Pengaruh Umur Administratif Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Umur administratif pemerintah daerah dilihat dari tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Semakin tua umur administratif Pemda, tingkat pengungkapan informasi yang ada di *website* juga semakin tinggi. Pemda yang sudah lama berdiri akan belajar dari pengalaman masa lalu sebagai bahan evaluasi untuk periode selanjutnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan periode selanjutnya untuk mejalankan pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mendasarkan pada teori *signaling*, pemerintah daerah yang sudah lama berdiri akan menunjukkan sinyal kepada *stakeholder* publik dengan cara menyajikan LKPD pada *websitenya* berdasarkan pengalaman dan kemampuannya untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh umur administratif Pemda (Rahim & Martani (2016), Rosita & Arifin (2017), dan Setyaningrum & Syafitri (2012) memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya semakin tua umur adminsitratif Pemda memberikan dorongan kepada Pemda untuk melakukan pengungkapan LKPD secara lengkap. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.3.4. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam Website Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber keuangan pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik berasal dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan pinjaman dari pihak lain. Pendapatan asli daerah berasal dari pengelolaan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi dalam penerapan otonomi daerah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah memiliki potensi yang sama sehingga pendapatan asli daerah yang diterima berbeda-beda tiap wilayah.

Untuk mengurangi kesenjangan fiskal tersebut maka dimunculkanlah dana perimbangan. Menurut Robin dan Austin (1987) dalam Puspita & Martani (2012), dana perimbangan merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka Pemda cenderung melakukan praktik IFR. Hal tersebut didorong karena pemerintah pusat memantau apa yang dilakukan oleh Pemda. Dengan mendasarkan pada teori *agency*, pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen, dimana pemerintah daerah selain bertanggung jawab kepada pemilih atau rakyat juga kepada pemerintah pusat. Menurut teori institusional, *coercive isomorphism* Pemda dengan tingkat ketergantungan yang tinggi akan cenderung melakukan praktik IFR, hal ini dikarenakan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan dana untuk merespon tekanan dari pemerintah pusat sebagai pemberi dana perimbangan (bantuan dana). Sejalan dengan teori *signaling*, pemerintah daerah

dengan tingkat ketergantungan tinggi akan menunjukkan sinyal yang baik kepada pemerintah pusat untuk melihat kinerja pemerintah daerah tersebut dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Hasil penelitian Puspita & Martani (2012) dan Ratmono (2013) menunjukkan hubungan positif signifikan antara tingkat ketergantungan dengan pengungkapan laporan keuangan pada *website* Pemda. Sebaliknya hasil penelitian Hilmi & Martani (2012) tidak dapat memberikan bukti empiris antara dua variabel tersebut. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.3.5. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Mengutip Rahim & Martani (2016) menurut amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka semakin besar tanggung jawab dan pelayanan yang harus dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Besarnya jumlah penduduk mengindikasikan jumlah *stakeholder* yang beragam dan membutuhkan transparansi dari pemerintah daerah, untuk mengemat biaya (*cost-efficient*) pemerintah daerah dapat melakukan praktik IFR pada *websitenya*.

Berdasarkan teori institusional, *coercive isomorphism* menjelaskan bahwa entitas yang berukuran besar lebih *public visible*, yakni mendapatkan tekanan yang lebih besar dari para *stakeholdernya*. Pemda dengan jumlah populasi tinggi

memiliki insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan reputasi dan *public image* mereka (Ratmono, 2013). Dalam konteks sektor publik, teori keagenan menjelaskan bahwa entitas besar akan menunjukkan asimetri informasi yang lebih besar antara *agen* dan *principal* serta adanya *bonding cost* (biaya yang dikeluarkan *agent* untuk menyampaikan laporan keuangan kepada *principal*) yang lebih besar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2012), Puspita & Martani (2012), Rahim & Martani (2016), dan Styles & Tennyson (2007) kompleksitas pemerintahan yang diprosikan dengan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan konten dalam *website* Pemda, sedangkan Afryansyah & Haryanto (2013), Alhajjriana et al. (2017), dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik IFR. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H5: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.3.6. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat sebagai *principal* pemerintah (www.bps.go.id). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia IPM yang diolah oleh BPS RI, digunakan sebagai ukuran kinerja Pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat,

menunjukkan tingginya kesadaran terhadap akses informasi maka semakin tinggi tekanan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangan.

Dengan mendasarkan pada, teori institusional *normative isomorphism* semakin tingginya tekanan dari professional pemerintah cenderung melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk merespon tekanan tersebut. Asimetri informasi yang dijelaskan dalam teori keagenan semakin rendah, karena pemerintah mengimbangi kualitas hidup masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet.

Penggunaan variabel IPM dalam penelitian ini belum banyak dilakukan di Indonesia, hasil penelitian Hanifah et al. (2017) menunjukkan pengaruh signifikan antara IPM terhadap praktik IFR. Nilai IPM yang tinggi mendorong pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan daerah pada *website* resmi Pemda. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H6: Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting*

2.3.7. Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Permerintah Daerah

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan perkapita daerah. Daerah dengan pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat penguasaan teknologi masyarakat untuk mengakses informasi melalui internet relatif lebih tinggi. Pendapatan per kapita yang semakin tinggi akan

mengakibatkan masyarakat melakukan *political monitoring* yang semakin tinggi pula sehingga tekanan yang diberikan untuk menyediakan informasi kepada publik semakin lebih besar (Styles & Tennyson, 2007). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan dalam *websitenya*.

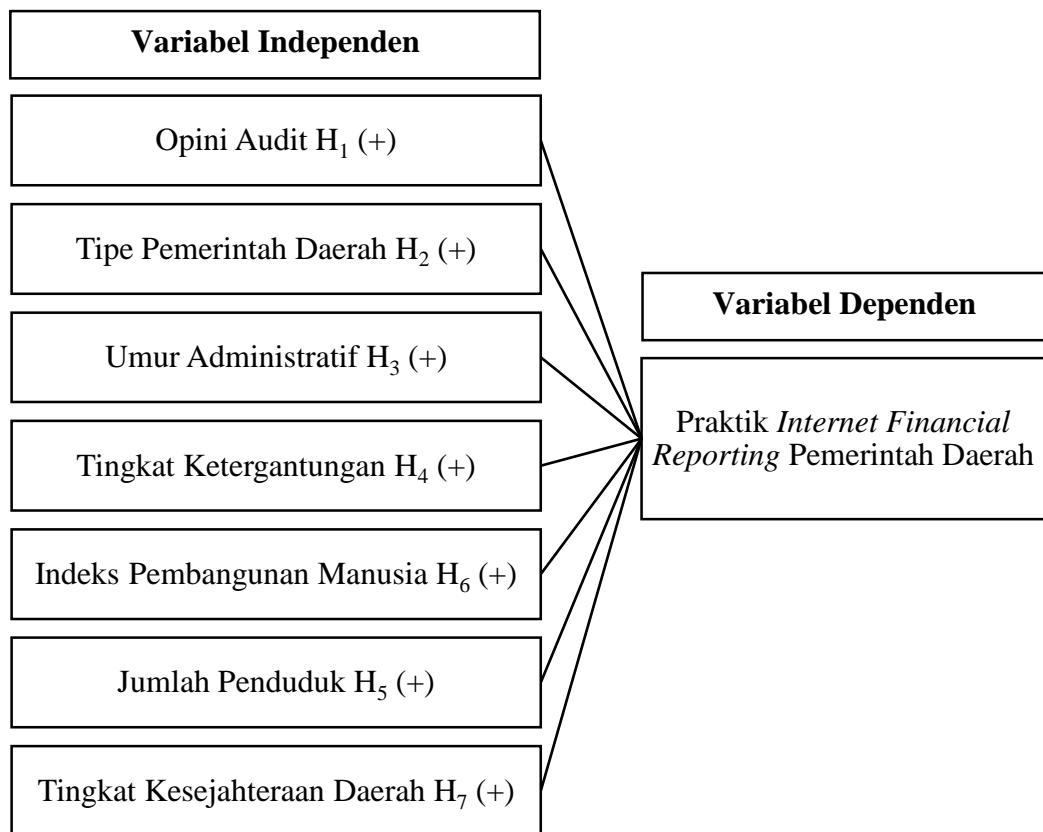
Berdasarkan teori institusional, *normative isomorphism* semakin tingginya tekanan dari professional, pemerintah cenderung melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk merespon tekanan tersebut. Menurut teori *signalling* pemerintah akan mengungkapkan informasi untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat akan kinerjanya, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dengan penguasaan teknologi yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahim & Martani (2016) dan Styles & Tennyson (2007) menyatakan bahwa kesejahteraan penduduk memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website*, kondisi masyarakat yang sejahtera akan meningkatkan kepedulian terhadap pelaksanaan pemerintahan sehingga tekanan untuk melaporkan informasi menjadi lebih tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Verawaty (2015) tingkat kesejahteraan penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik IFR.

H7: Tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel dependen (praktik *internet financial reporting* pemerintah daerah) dan variabel independen (opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat kesejahteraan daerah). Sehingga didapatkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia yang berjumlah 514 pemerintah daerah (416 Kabupaten dan 98 Kota). Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini, sample yang diambil dari suatu populasi ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bukan termasuk pemerintah daerah pemekaran minimal 3 tahun terakhir dan merupakan daerah otonom (bukan merupakan kabupaten/kota administratif).
2. Pemerintah daerah memiliki *website* yang dapat diakses dengan domain go.id.
3. *Website* pemerintah daerah menyediakan Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK RI tahun anggaran 2016 dan atau 2017.
4. Pemerintah daerah yang menyediakan seluruh data-data statistik yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui media internet dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Variabel dependen (praktik *internet financial reporting*), diakses pada tanggal 17 Oktober sampai 22 November 2018 dari *website* masing-masing

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Website* pemerintah daerah dicari melalui *google search* menggunakan aplikasi *Google Chrome* versi 69.0.3497.100 dan melalui *website* Kementerian Dalam Negeri RI (www.keuda.kemendagri.go.id).

Data yang digunakan dalam variable independen, berupa ringkasan laporan realisasi anggaran Pemda kabupaten/kota yang diperoleh melalui (www.djpk.kemenkeu.go.id). Data mengenai opini audit atas LKPD diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (www.bpk.go.id). Data mengenai tahun pembentukan daerah otonom diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri RI (www.kemendagri.go.id). Data mengenai jumlah penduduk, indeks pembangunan daerah (IPM) dan produk domestik regional bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI (www.bps.go.id). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya dan beberapa berita guna dijadikan sebagai referensi dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian.

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

3.3.1.1. *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah (IIFR)

Variabel dependen berupa tingkat praktik *internet financial reporting* di lingkungan pemerintah daerah diukur menggunakan indeks *skoring (checklist)* tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda. Indeks pengungkapan informasi keuangan Pemda didasarkan pada penelitian Styles & Tennyson (2007) tentang keteraksesan *internet financial reporting* Pemda dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Data penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap *website* pemerintah daerah otonom tingkat II (kabupaten/kota). Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap informasi keuangan yang diungkapkan dalam *website* tersebut kemudian ketersediaan informasi dicocokkan dengan indeks *skoring (checklist)* yang telah disusun sebelumnya dengan memberikan nilai sesuai skor jika sesuai syarat indeks dan 0 jika tidak sesuai syarat indeks.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Opini Audit (OP)

Opini audit merupakan pernyataan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit per pemerintah daerah yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI tahun 2016-2017. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemerintah daerah dengan opini WTP diberikan nilai 1 sedangkan pemerintah daerah dengan opini selain WTP diberikan nilai 0 (Nosihana & Yaya, 2016) .

3.3.2.2. Tipe Pemerintah Daerah (TYPE)

Perbedaan karakteristik pemerintah daerah otonom tingkat II (kabupaten dan kota) dapat dilihat baik dari perbedaan geografis maupun demografis. Kabupaten memiliki daerah yang relatif lebih luas dengan jumlah penduduk relatif lebih kecil dibandingkan daerah kota. Taraf hidup masyarakat dari sisi sosial, ekonomi dan pendidikan daerah kota cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten (Rahim & Martani, 2016). Perbedaan tersebut akan memberikan tingkat pengungkapan yang berbeda pada *website* pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel tipe pemerintah daerah menggunakan variabel *dummy* dimana memberikan skor 1 untuk Pemda Kota dan 0 untuk Pemda Kabupaten (Nosihana & Yaya, 2016). Data tipe daerah otonom (kabupaten/kota) diperoleh dari situs Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri.

3.3.2.3. Umur Administratif (AGE)

Pemerintah daerah yang memiliki usia lebih lama cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik karena telah belajar dari pengalaman periode sebelumnya. Pelayanan publik oleh Pemda yang telah lama berdiri akan menggunakan fasilitas internet lebih banyak dibandingkan Pemda yang baru berdiri. Pengukuran variabel umur administratif Pemda dilakukan dengan cara menghitung tahun berdiri Pemda (berdasarkan undang-undang pembentukan daerah otonom kabupaten/kota) hingga tahun 2016 dan 2017 (Rosita & Arifin, 2017). Data undang-undang pembentukan daerah otonom diperoleh dari situs Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri.

3.3.2.4. Tingkat Ketergantungan (DEPEND)

Dikutip dalam penelitian Puspita & Martani (2012) menurut Robbin dan Austin (1987) memaparkan bahwa *intergovernmental revenue* (Dana Perimbangan) merepresentasikan tingkat ketergantungan Pemda. Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat akan melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi dan memiliki pengungkapan rata-rata konten dan presentasi yang tinggi pada *website* Pemda (Puspita & Martani, 2012).

Menurut Puspita & Martani (2012) tingkat ketergantungan Pemda akan dana transfer pemerintah pusat dihitung dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$DEPEND = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Realisasi Anggaran Pendapatan}}$$

3.3.2.5. Jumlah Penduduk (SIZE)

Daerah otonom yang memiliki jumlah penduduk yang besar mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki *stakeholder* yang beragam. Kebutuhan informasi masing-masing *stakeholder* Pemda berbeda-beda untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menggunakan internet merupakan tindakan yang paling memenuhi *value of money* (ekonomi, efisien dan efektif) untuk daerah dengan jumlah penduduk besar. Pengukuran variabel jumlah penduduk yakni berdasar logaritma natural dari jumlah populasi suatu daerah kabupaten/kota pada tahun 2016 dan 2017 (Verawaty, 2015). Data jumlah populasi diperoleh dari BPS RI.

3.3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Pengukuran variabel indeks pembangunan manusia menggunakan data IPM yang ada dalam *website* BPS RI (Hanifah et al., 2017). BPS RI melakukan pengukuran IPM pada tiap daerah di Indonesia berdasarkan tiga dimensi dasar yakni, (i) umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, (ii) pengetahuan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan (iii) standar hidup layak diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

3.3.2.7. Tingkat Kesejahteraan Daerah (PDRB)

Proksi yang digunakan dalam pengukuran variabel tingkat kesejahteraan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku (Verawaty, 2015). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (mencakup komponen-komponen pendapatan faktor yakni upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung neto) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (www.bps.go.id). Data PDRB tahun 2016 dan 2017 diperoleh dari situs BPS RI. PDRB perkapita dihitung dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per Kapita} = \text{Log} \frac{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk Daerah}}$$

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan *software* komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 25. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan informasi deskriptif dari perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan nilai rata-rata (mean). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku dan distribusi suatu data sampel (Ghozali, 2011).

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini ditujukan untuk menguji apakah antarvariabel independen dalam model regresi terdapat kolerasi (Ghozali, 2011). Karena di dalam model regresi yang baik seharusnya tidak ada kolerasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Jika ditemukan kolerasi antar variabel independen maka dapat dikatakan terjadi problem multikolinearitas dalam model regresi, peneliti dapat melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan alat bantu SPSS. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *Tolerance* yang rendah akan sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang digunakan pada umumnya adalah:

1. Jika ada variabel independen memiliki nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen di dalam model regresi.
2. Jika tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* < 0.10 dan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 , maka tidak terjadi problem multikolinearitas.

3.4.2.2. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi ditujukan untuk menguji apakah ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear, yang biasanya terjadi pada data *time series*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data panel (kombinasi antara

data *time series* dan *cross section*), maka diperlukan uji autokorelasi. Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokolerasi.

Menurut Ghozali (2011), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut, dapat menggunakan uji Durbin Watson dan uji *Run Test*. Uji Durbin Watson dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dengan membandingkan nilai DW terhadap batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Jika nilai DW berada diantara dL dan dU atau diantara dU dan 4-dL atau diantara 4-dU dan dL-4, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji *Run Test* adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi. Apabila tidak terdapat hubungan kolerasi antar residual maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > alpha (5%) (Ghozali, 2011).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu apabila data memiliki varian yang sama (homokedastisitas) atau tidak memiliki varian yang berbeda (heteroskedastisitas). Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas adalah uji scatterplot (Ghozali, 2011).

3.4.2.4. Uji Normalitas

Uji normalitas ini ditujukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Di dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dengan membandingkan p value dengan tingkat signifikansi 5%. Jika p Value > 5%, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.4.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Persamaan regresi berganda diinterpretasikan sebagai berikut:

$$IIFR = \alpha + \beta_1 OP + \beta_2 TYPE + \beta_3 AGE + \beta_4 DEPEND + \beta_5 SIZE + \beta_6 IPM + \beta_7 PDRB + e$$

Keterangan:

IIFR : Indeks *Internet Financial Reporting*

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

OP : Opini Audit BPK RI

TYPE : Jenis Pemerintah Daerah

AGE : Umur Administratif

DEPEND : Tingkat Ketergantungan Daerah

SIZE : Jumlah Penduduk

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PDRB : Tingkat Kesejahteraan Daerah

e : *error*

3.4.4. Pengujian Hipotesis

3.4.4.1. Uji t

Menurut Ghozali (2011) uji t (parsial) adalah pengujian koefisien regresi pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian:

1. Bila nilai signifikan < nilai alpha (5%), berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikan > nilai alpha (5%), berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen, maka R^2 pasti mengikat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R^2) (Ghozali, 2011).

3.5. Hipotesa Operasional

3.5.1. Opini Audit

$H_0; \beta_1 \leq 0$: Opini audit tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_a; \beta_1 > 0$: Opini audit berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.2. Tipe Pemerintah Daerah

$H_0; \beta_2 \leq 0$: Tipe Pemda tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_a; \beta_2 > 0$: Tipe Pemda berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.3. Umur Administratif

$H_0; \beta_3 \leq 0$: Umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_a; \beta_3 > 0$: Umur administratif berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.4. Tingkat Ketergantungan

$H_0; \beta_4 \leq 0$: Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_{a1}; \beta_4 > 0$: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.5. Jumlah Penduduk

$H_{01}; \beta_5 \leq 0$: Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_{a1}; \beta_5 > 0$: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.6. Indeks Pembangunan Manusia

$H_{01}; \beta_6 \leq 0$: Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

$H_{a1}; \beta_6 > 0$: Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

3.5.7. Tingkat Kesejahteraan Daerah

$H_{01}; \beta_7 \leq 0$: Tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

Ha1; $\beta_7 > 0$: Tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap *praktik internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi *website* Pemda Kabupaten dan Kota dengan domain go.id. tahun 2016-2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan diperoleh sebanyak 67 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia sehingga jumlah data pada penelitian ini adalah 134 data (67 x 2 tahun). Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia	514
2	Pemerintah daerah kabupaten/kota administratif	(6)
3	Pemerintah daerah yang tidak memiliki <i>website</i> resmi	(7)
4	Pemerintah daerah yang <i>website</i> resminya dalam masa perbaikan dari tanggal 17 Oktober – 22 November 2018	(27)
5	Pemerintah daerah yang tidak memiliki menu transparansi pengelolaan anggaran daerah dalam <i>website</i> resminya	(266)
6	Pemerintah daerah yang tidak menyediakan laporan realisasi APBD 2016 dan atau 2017 dalam <i>website</i> resminya	(141)
	Jumlah Sampel	67

Sumber: data diolah, 2018

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data secara deskriptif, yang dapat dilihat dari nilai median, rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, varians, sum, range, kurtosis dan skewness

(Ghozali,2011). Berikut hasil statistik deskriptif dari 134 data observasi *website* pemerintah daerah:

Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IIFR	134	0.17	1.00	0.5287	0.20459
OP	134	0	1	0.87	0.334
TYPE	134	0	1	0.27	0.445
AGE	134	8	67	56.5896	17.82801
DEPEND	134	0.07	0.68	0.4493	0.10168
SIZE	134	4.95	6.76	5.8295	0.38621
IPM	134	61.88	83.95	71.466	5.35509
PDRB	134	7.19	8.27	7.5645	0.24539

Sumber: data output SPSS diolah, 2018

Dari hasil analisis pada tabel 4.2. maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Opini Audit (OP) memiliki nilai rata-rata 0,87 artinya rata-rata dari seluruh opini audit sebesar 0,87. Variabel ini merupakan variabel dummy sehingga memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum 0 adalah Pemda yang memperoleh opini Non WTP sebanyak 17 Pemda (12,7%) dan nilai maksimum 1 adalah Pemda yang memperoleh opini WTP sebanyak 117 Pemda (87,3%). Standar deviasi variabel OP sebesar 0,334 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel OP sebesar 0,334 dari 134 data penelitian.
- b. Variabel Tipe Pemda (TYPE) memiliki nilai rata-rata 0,27 artinya rata-rata dari seluruh tipe Pemda sebesar 0,27. Variabel ini menggunakan

variabel dummy sehingga memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum 0 adalah 98 (73,1%) pemerintah kabupaten dan nilai maksimum 1 adalah 36 (26,9%) pemerintah daerah kota. Standar deviasi variabel TYPE sebesar 0,445 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel TYPE sebesar 0,445 dari 134 data penelitian.

- c. Variabel Umur Administratif (AGE) memiliki nilai rata-rata 56,59 artinya tingkat umur daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar 57 tahun. Nilai minimum umur daerah adalah sebesar 8 tahun (Kab. Lombok Utara) dan nilai maksimum umur daerah adalah sebesar 67 tahun yang diperoleh sebanyak 40 (29,9%) kabupaten/kota. Standar deviasi variabel AGE sebesar 17,828 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel AGE sebesar 17,828 dari 134 data penelitian.
- d. Variabel Tingkat Ketergantungan (DEPEND) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4493 artinya rata-rata seluruh tingkat ketergantungan adalah 0,4493. Nilai minimum sebesar 0,07 (Kab. Badung) dan nilai maksimum sebesar 0,68 (Kab. Subang). Standar deviasi variabel DEPEND sebesar 0,10168 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel DEPEND sebesar 0,10168 dari 134 data penelitian.
- e. Variabel Jumlah Penduduk (SIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 5.8295 artinya rata-rata seluruh jumlah populasi adalah 5.8295 atau 968.275,24 jiwa. Nilai minimum sebesar 4.95 atau 88.971 jiwa (Kab. Lingga) dan nilai maksimum sebesar 6.75 atau 5.715.009 jiwa (Kab.

Bogor). Standar deviasi variabel SIZE sebesar 0.38621 atau 895.495,579 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel SIZE sebesar 895.495,579 dari 134 data penelitian.

- f. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 71,4660 artinya rata-rata seluruh IPM adalah 71,4660. Nilai minimum sebesar 61,88 (Kab. Tanjung Jabung Timur) dan nilai maksimum sebesar 83,95 (Kota Banda Aceh). Standar deviasi variabel IPM sebesar 5,35509 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel IPM sebesar 5,35509 dari 134 data penelitian.
- g. Variabel Tingkat Kesejahteraan Derah (PDRB) memiliki nilai rata-rata sebesar 44.165.474,5 artinya rata-rata seluruh PDRB per Kapita adalah 7.5645 atau Rp.44.165.474,5. Nilai minimum sebesar 7.19 atau 15.501.207,25 (Kab. Pematang Jaya) dan nilai maksimum sebesar 8.27 atau 187.543.772.62 (Kab. Sumbawa Barat). Standar deviasi variabel PDRB per kapita sebesar 0.24539 atau 32.674.998,2 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel PDRB per kapita sebesar 32.674.998,2 dari 134 data penelitian.
- h. Variabel Indeks Praktik *Internet Financial Reporting* (IIFR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5287 artinya rata-rata seluruh Indeks adalah 0,5287. Nilai minimum sebesar 0,17 (Kab. Tanah Bumbu) dan nilai maksimum sebesar 1,00 (Kab. Trenggalek). Standar deviasi variabel Indeks sebesar 0,20459 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran variabel Indeks sebesar 0,20459 dari 134 data penelitian.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (inter korelasi). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance $> 0,1$ atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka diindikasikan bahwa persamaan regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
OP	0.878	1.139	Tidak ada Multikolinearitas
TYPE	0.452	2.215	Tidak ada Multikolinearitas
AGE	0.745	1.343	Tidak ada Multikolinearitas
DEPEND	0.442	2.261	Tidak ada Multikolinearitas
SIZE	0.638	1.567	Tidak ada Multikolinearitas
IPM	0.377	2.656	Tidak ada Multikolinearitas
PDRB	0.577	1.733	Tidak ada Multikolinearitas

Sumber: data output SPSS diolah, 2018

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.2. Uji Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan data panel sehingga perlu dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode

t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson dan Uji Run Test.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.530

Dapat dilihat dari tabel 4.4 bahwa nilai DW 1,540 akan kita bandingkan dengan nilai tabel menggunakan alpha 5% jumlah observasi 134 dan jumlah variabel bebas 7 sehingga diperoleh dL 1,6096 dan nilai dU 1,8288 sehingga dapat disimpulkan terjadi autokorelasi positif. Untuk mengatasi hal tersebut kita lakukan uji run test.

Tabel 4.5 Uji Run Test

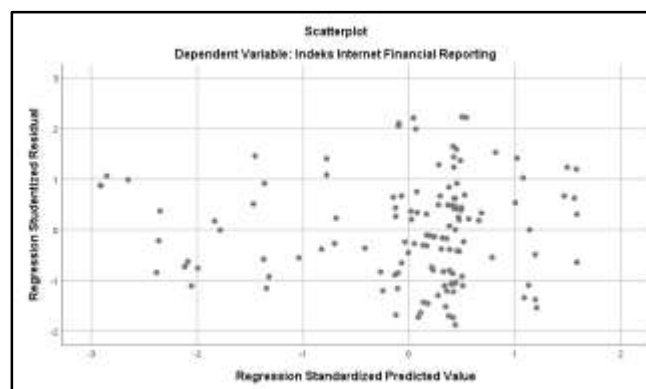
	Unstandardized Residual
Test Value	-0.01102
Cases < Test Value	67
Cases >= Test Value	67
Total Cases	134
Number of Runs	59
Z	-1.561
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.119

Sumber: data output SPSS diolah, 2018

Hasil output SPSS pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,119 lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan cara grafik scatterplots untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas.



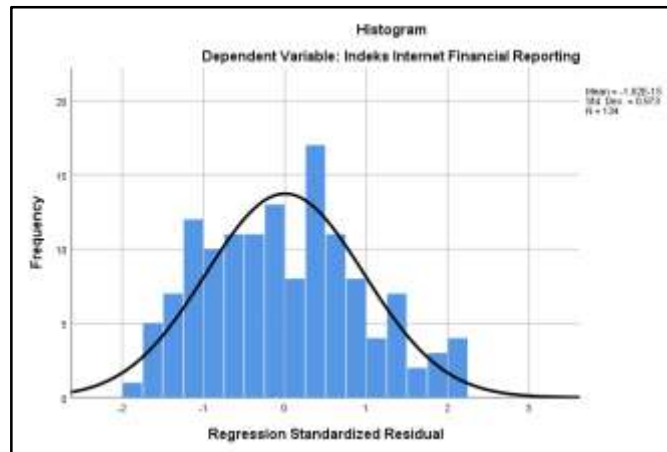
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

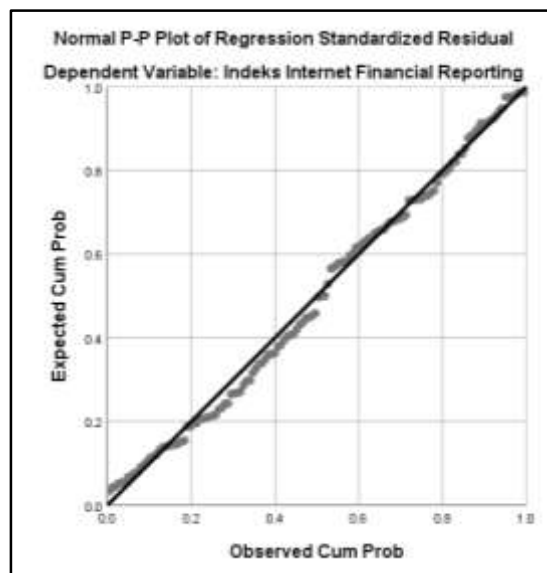
4.3.4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati lonceng dan plot linear

memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linier diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi dalam uji Kolmogorov-Smirnov > 0.05 , maka data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.3 Grafik Plot Linier Uji Normalitas

Tabel 4.6 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		134
Normal Parameters	Mean	0
	Std. Deviation	0.1917198
Most Extreme Differences	Absolute	0.054
	Positive	0.054
	Negative	-0.037
Test Statistic		0.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Sumber: data output SPSS diolah, 2018

Dengan melihat tampilan gambar 4.2 dan 4.3 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati bentuk lonceng, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik bergerak mengikuti garis linier diagonal. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,200 dimana lebih besar dari α 0,05 yang artinya dalam penelitian ini data residual berdistribusi normal.

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0.737	0.768	0.444	
Opini Audit	0.036	0.663	0.509	H1 tidak didukung
Tipe Pemda	0.072	1.260	0.210	H2 tidak didukung
Umur Administratif	0.004	3.345	0.001	H3 didukung
Tingkat Ketergantungan	0.077	0.303	0.762	H4 tidak didukung
Jumlah Penduduk	-0.022	-0.399	0.690	H5 tidak didukung
IPM	0.000	0.076	0.939	H6 tidak didukung
Tingkat Kesejahteraan	-0.053	-0.582	0.561	H7 tidak didukung
Adjusted R Square	0.073			

Sumber: data output SPSS diolah, 2018

Dari tabel 4.7 hasil pengujian regresi berganda, model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah

$$\text{IFR} = 0,737 + 0,036\text{OP} + 0,072\text{TYPE} + 0,004\text{AGE} + 0,077\text{DEPEND} - 0,072\text{SIZE} + 0,000\text{IPM} - 0,053\text{PDRB} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas didapatkan kesimpulan terhadap hubungan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,737 menunjukkan apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka besarnya nilai praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda akan sebesar 0,737.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel opini audit adalah positif sebesar 0,036 yang berarti setiap peningkatan opini audit sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,036 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel tipe Pemda adalah positif sebesar 0,072 yang berarti setiap peningkatan tipe Pemda sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,072 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel umur administratif adalah positif sebesar 0,004 yang berarti setiap peningkatan umur administratif sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan praktik *internet*

financial reporting dalam *website* Pemda sebesar 0,004 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

5. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat ketergantungan adalah positif sebesar 0,077 yang berarti setiap peningkatan tingkat ketergantungan sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,077 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk adalah negatif sebesar 0,072 yang berarti setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,072 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Nilai koefisien regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia adalah positif sebesar 0,000 yang berarti setiap peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,000 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
8. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan per kapita adalah negatif sebesar 0,053 yang berarti setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda sebesar 0,053 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.7 besarnya adjusted R^2 adalah 0,073 (7,3%), hal ini berarti bahwa hanya sebesar 7,3% variasi praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat diketahui oleh peneliti.

4.5.2. Uji t

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t dapat dilihat pada tabel 4.8, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $0,768 < t$ tabel 1,9789 dan nilai signifikansi sebesar $0,509 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel OP bernilai positif 0,036, sehingga H_1 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $1,260 < t$ tabel 1,9789 dan nilai signifikansi sebesar $0,509 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien

β dari variabel TYPE bernilai positif 0,072, sehingga H2 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $3,345 > t$ tabel 1,9789 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel AGE bernilai positif 0,004, sehingga H3 diterima atau didukung. Hal ini menunjukkan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $0,303 < t$ tabel 1,9789 dan nilai signifikansi sebesar $0,762 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel DEPEND bernilai positif 0,077, sehingga H4 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $-0,399 < t$ tabel $1,9789$ dan nilai signifikansi sebesar $0,690 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel SIZE bernilai negatif $0,072$ sehingga H_5 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

6. Pengujian Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $0,076 < t$ tabel $1,9789$ dan nilai signifikansi sebesar $0,939 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel IPM bernilai positif $0,000$, sehingga H_6 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

7. Pengujian Hipotesis Ketujuh

Hipotesis ketujuh penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Besarnya nilai t hitung $-0,582 < t$ tabel $1,9789$ dan nilai signifikansi sebesar $0,561 > \alpha$

0,05. Nilai koefisien β dari variabel PDRB bernilai negatif 0,053, sehingga H7 ditolak atau tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel opini audit berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,036 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,509 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 yang mengharapkan berpengaruh positif antara opini audit terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan jika opini audit wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori institusional, *coercive isomorphism* dikarenakan adanya tekanan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan keuangan pemerintah wajib diaudit dengan opini dari BPK RI dan dilaporkan kepada DPR/D serta masyarakat luas. Dalam teori *agency*, peran BPK RI sebagai auditor pemerintah

adalah mengurangi *agency problem* (adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*). Sejalan dengan teori *signaling*, jika pemerintah daerah mendapatkan opini WTP maka Pemda cenderung akan memberikan sinyal yang baik atas kinerjanya kepada masyarakat. Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari BPK RI tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Pembuktian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nosihana & Yaya, 2016) dan (Ratmono, 2013) yang membuktikan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian belum tentu mealakukan praktik *internet financial repoting* dalam *websitenya* dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemda yang mendapatkan opini selain WTP tidak selalu mengindikasikan kinerja dan akuntabilitas Pemda tersebut buruk karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil laporan keuangan saja. Terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat suap-menyuap kepada aparat BPK RI untuk mendapatkan opini WTP sehingga dapat dikatakan opini WTP tidak menjamin kinerja pemerintah yang baik atau terbebas dari tindak korupsi (Nosihana & Yaya, 2016). Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa BPK RI melalui laporan IHPS II tahun 2017, mengungkapkan 5.852 permasalahan, 33% diantaranya menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.6.2. Tipe Pemda Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel tipe pemerintah daerah berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,072 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,210 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 yang mengharapkan berpengaruh positif antara tipe pemerintah daerah terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan tipe pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Berdasarkan teori institusional, *normative isomorphism* (pemerintah kota akan melakukan praktik IFR karena adanya tekanan dari pelaku profesional) dan *mimetic isomorphism* (pemerintah kota atau kabupaten akan meniru praktik IFR yang dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten yang lain yang sudah mendapatkan legitimasi publik). Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya tipe pemerintah daerah tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*. Pemerintah daerah kota yang seharusnya memiliki tingkat akses internet yang tinggi tidak menjamin pemerintah daerah melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*. Hal ini dikarenakan, semakin

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berdampak pada jangkauan internet yang semakin luas hingga ke pedesaan sama halnya seperti pada daerah kota. Berbagai persamaan UU dan Instruksi Pemerintah dalam mengatur pengungkapan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga tidak ada perbedaan dalam melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah (Nosihana & Yaya, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nosihana & Yaya, 2016) yang membuktikan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

4.6.3. Umur Administratif Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel umur administratif berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,004 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,001 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 yang mengharapkan berpengaruh positif antara umur administratif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi usia pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori *signaling*, pemerintah daerah yang sudah lama berdiri akan menunjukkan sinyal kepada *stakeholdernya* dengan cara menyajikan LKPD pada situsnya berdasarkan pengalaman dan kemampuannya untuk meningkatkan rasa kepercayaan terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah yang dibentuk terlebih dahulu sesuai undang-undang pembentukan daerah otonom kabupaten/kota akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih dalam mengungkapkan informasi kepada publik, lamanya umur administratif yang dimiliki suatu *website* pemerintah daerah akan menunjukkan kualitas yang lebih baik (Rosita & Arifin, 2017).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rosita & Arifin, 2017) dan (Setyaningrum & Syafitri, 2012) yang membuktikan umur administratif berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti umur administratif mendorong pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

4.6.4. Tingkat Ketergantungan Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel tingkat ketergantungan berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,077 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,762 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₄ yang mengharapkan berpengaruh positif antara tingkat ketergantungan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan besar kecilnya dana alokasi umum (DAU) tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori *agency* konteks sektor publik, pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen, dimana pemerintah daerah selain bertanggung jawab kepada pemilih atau rakyat juga kepada pemerintah pusat. Menurut teori institusional, *coercive isomorphism* Pemda dengan tingkat ketergantungan yang tinggi akan cenderung melakukan praktik IFR, hal ini dikarenakan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan dana untuk merespon tekanan dari pemerintah pusat sebagai pemberi dana perimbangan (bantuan dana). Sejalan dengan teori *signaling*, pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi akan menunjukkan sinyal yang baik kepada pemerintah pusat untuk melihat kinerja pemerintah daerah tersebut dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya besar kecilnya tingkat ketergantungan daerah tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningrum & Syafitri, 2012) dan (Hilmi & Martani, 2012) yang membuktikan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting*

dalam *website* pemerintah daerah. Hal tersebut diduga karena pemerintah pusat selama ini kurang memberikan kontrol dan monitoring terhadap penggunaan dana perimbangan sehingga Pemda tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan pengungkapan dalam *websitenya* (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Selain itu terdapat dugaan penyelewengan dana alokasi umum karena pemerintah daerah tidak secara langsung bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melainkan kepada DPRD.

4.6.5. Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel jumlah penduduk berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar -0,022 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,690 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_5 yang mengharapkan berpengaruh positif antara jumlah penduduk terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan besar kecilnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori institusional, *coercive isomorphism* menjelaskan bahwa entitas yang berukuran besar lebih *public visible* dan mendapatkan tekanan yang lebih besar dari para *stakeholdernya*. Pemda dengan jumlah populasi tinggi memiliki

insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan reputasi dan *public image* mereka (Ratmono, 2013). Dalam konteks sektor publik, teori keagenan menjelaskan bahwa entitas besar akan menunjukkan asimetri informasi yang lebih besar antara *agen* dan *principal* serta adanya *bonding cost* (biaya yang dikeluarkan *agent* untuk menyampaikan laporan keuangan kepada *principal*) yang lebih besar.

Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*. Hal ini diduga karena pemerintah daerah di Indonesia saat ini masih merasa bahwa secara umum penduduk belum memahami fungsi teknologi informasi untuk pelaporan akuntansi sektor publik. Indeks pembangunan infrastruktur di Indonesia masih rendah dan jaringan internet belum merata. Jadi yang diperlukan tidak hanya kuantitas penduduk, tetapi kualitas penduduk sehingga dapat memiliki alasan yang kuat untuk menuntut praktik *internet financial reporting* pemerintah daerah tersebut karena telah dapat memahami manfaat yang akan diperoleh (Verawaty, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afryansyah & Haryanto (2013), Alhajjriana et al. (2017), Ratmono (2013) dan Verawaty (2015) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

4.6.6. Indeks Pembangunan Manusia Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel indeks pembangunan manusia berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,000 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,939 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_6 yang mengharapkan berpengaruh positif antara indeks pembangunan manusia terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan besar kecilnya tingkat indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori institusional *normative isomorphism* semakin tingginya tekanan dari professional pemerintah cenderung melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk merespon tekanan tersebut. Asimetri informasi yang dijelaskan dalam teori keagenan semakin rendah, karena pemerintah mengimbangi kualitas hidup masyarakat dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet. Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*. Hal ini diduga pemerintah daerah mungkin kurang menyadari tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan informasi keuangan atau masyarakat tidak mempedulikan masalah

keterbukaan informasi publik yang dianggap kurang penting. Kurangnya kebiasaan pemerintah daerah untuk mendokumentasikan dengan media teknologi informasi juga menjadi masalah tersendiri, padahal kemampuan mendokumentasi telah menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering* yang seharusnya telah menjadi kompetensi pemerintah daerah (Verawaty, 2015).

4.6.7. Tingkat Kesejahteraan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap *Praktik Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Variabel tingkat kesejahteraan daerah berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan koefisien regresi sebesar -0,053 dan nilai signifikansi (P_1 Value) sebesar 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Dari pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_7 yang mengharapkan berpengaruh positif antara tipe pemerintah daerah terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah **tidak didukung** secara statistik oleh hasil penelitian. Hal ini dapat diartikan besar kecilnya tingkat kesejahteraan daerah yang diprosikan dengan pendapatan per kapita tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*.

Dalam teori institusional, *normative isomorphism* semakin tingginya tekanan dari professional, pemerintah cenderung melakukan pengungkapan laporan

keuangan untuk merespon tekanan tersebut. Menurut teori *signalling* pemerintah akan mengungkapkan informasi untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat akan kinerjanya, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dengan penguasaan teknologi yang dimiliki. Namun demikian, hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwasannya tingkat kesejahteraan daerah tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *websitenya*. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang tinggi belum tentu masyarakat peduli terhadap keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah, seringkali masyarakat hanya peduli terhadap kepentingan pribadinya saja. Alasan lainnya yakni masalah *e-leadership* pemerintah daerah dimana prioritas dan inisiatif pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi belum optimal (Verawaty, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Arifin, 2017) yang membuktikan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila opini audit yang diukur berdasarkan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau selain wajar tanpa pengecualian, maka opini audit dari BPK RI tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.
2. Tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila tipe pemerintah daerah yang diukur berdasarkan wilayah Pemda kabupaten atau kota dan menjadi karakteristik pemerintah daerah, maka tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.
3. Umur administratif berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi umur administratif Pemda yang diukur berdasarkan UU pembentukan daerah otonom dan menjadi karakteristik pemerintah daerah, maka akan meningkatkan praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

4. Tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan DAU dibagi total pendapatan dan menjadi karakteristik pemerintah daerah, maka besar kecilnya tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.
5. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila jumlah penduduk yang diukur berdasarkan jumlah populasi kabupaten atau kota dan menjadi karakteristik demografi, maka besar kecilnya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.
6. Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila indeks pembangunan manusia yang diukur berdasarkan IPM kabupaten atau kota dan menjadi karakteristik demografi, maka besar kecilnya indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.
7. Tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti apabila tingkat kesejahteraan daerah yang diukur berdasarkan jumlah pendapatan per kapita dan menjadi karakteristik demografi, maka besar

kecilnya tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut yakni:

1. Masih rendahnya kemampuan variabel independen dalam penelitian, sehingga variabel dependen belum dapat dijelaskan secara luas oleh variabel independen.
2. Data laporan realisasi anggaran tahun 2017 diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga data Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Pemda bukan diperoleh langsung dari *website* Pemda kabupaten/kota, hal ini mengakibatkan Pemda yang seharusnya menjadi sampel penelitian tidak memberikan datanya secara lengkap.
3. Sampel penelitian Pemda kabupaten/kota yang digunakan tidak diambil dari masing-masing Provinsi di Indonesia, sehingga kurang dapat mewakili 34 Provinsi di Indonesia.

5.3. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam membentuk regulasi, penghargaan dan sanksi yang dikenakan agar tingkat praktik *internet financial reporting* dalam *website* Pemda meningkat. Regulasi yang diterapkan tidak hanya sekedar Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012,

melainkan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Sanksi yang diberlakukan dapat berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, denda, penundaan penyaluran dana alokasi umum, bahkan pengurangan dana alokasi umum. Untuk memotivasi Pemda atau Badan Publik lainnya dalam meningkatkan praktik IFR, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Publik dan PPID dapat meningkatkan penyelenggaraan *KIP Awards* hingga tingkat daerah secara rutin setiap tahun.

Serta diberlakukannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola *website* Pemda dalam melakukan praktik *internet financial reporting*. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memotivasi Pemda dalam membangun, mengevaluasi, dan mengembangkan *e-government* maupun *m-government* agar publik lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan serta mewujudkan adanya *good and clean governance*.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indeks praktik *internet financial reporting* seperti menambahkan checklist terhadap item-item pelaporan informasi keuangan dalam SAP maupun checklist peraturan terbaru.
2. Peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang dianggap mampu mempengaruhi praktik *internet*

financial reporting dalam *website* Pemda seperti tingkat penetrasi internet, alokasi belanja daerah untuk teknologi informasi, tingkat investasi, *leverage*, kompetisi politik, dan visibilitas media.

3. Peneliti dapat menambah sampel penelitian seperti badan publik, pemerintah provinsi atau pengambilan sampel Pemda yang mewakili 34 provinsi di Indonesia serta menggunakan periode tahun yang lebih lama untuk melihat perkembangan yang ada.
4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan topik mengenai persepsi pengguna LKPD terhadap praktik *internet financial reporting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D., & Haryanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3): 1–11.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2): 100–109.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2): 147-160.
- Eisenhard, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1): 57-74.
- García, A. C., & García-garcía, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5): 679–695.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hanifah, F. F., Suryarini, T., & Mukibad, H. (2017). Pengaruh Kompetisi Politik , IPM , Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–23, September 2017.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–26, September 2012.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 303-360.
- Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & Setyo, G. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–20, September 2017
- Kpk.go.id.(2018). <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37>. (Diakses: 1 Oktober 2018)
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 101–121.

- Mahmudi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–25, September 2012.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiarmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25–28, September 2013.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2): 28-48.

- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–26, September 2017.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 154–170.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities On The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1): 56–92.
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20: 571–611.
- Tirto.id. (2018). <https://tirto.id/indeks-keterbukaan-anggaran-indonesia-naik-di-level-64-cJk2>. (Diakses: 1 Oktober 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, September 2015.
- Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4): 1-12.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

No.	Variabel	Rumus Regresi	Perhitungan
1.	Indeks <i>Internet Financial Reporting</i>	IIFR	Menggunakan indeks aksesibilitas IFR yang dikembangkan oleh (Styles & Tennyson, 2007) dengan disesuaikan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012. Jika sesuai syarat ditambahkan sesuai skor, jika tidak memenuhi diberikan 0
2.	Opini Audit	OP	Menggunakan variabel <i>dummy</i> , Angka 1 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Angka 0 untuk opini selain WTP
3.	Tipe Pemerintahan	TYPE	Menggunakan variabel <i>dummy</i> , Angka 1 untuk Pemda Kota Angka 0 untuk Pemda Kabupaten
4.	Umur Administratif	AGE	2016 – tahun pembentukan daerah 2017 – tahun pembentukan daerah
5.	Tingkat Ketergantungan	DEPEND	$\frac{\text{Dana alokasi umum (DAU)}}{\text{Total realisasi anggaran pendapatan}}$
6.	Jumlah Penduduk	SIZE	Log Jumlah penduduk daerah
7.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks pembangunan manusia
8.	Tingkat Kesejahteraan Daerah	PDRB	$\text{Log} \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk daerah}}$

LAMPIRAN 2

INDEKS PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING*

Poin	Syarat	Skor	
		2016	2017
A	Jika <i>website</i> resmi pemerintah daerah dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian <i>google</i> dengan mengetik nama pemerintah daerah		+1
B	Jika terdapat <i>link</i> data informasi keuangan seperti <i>highlight</i> , LKPD dan APBD pada halaman depan (home) <i>website</i>	+1	+1
C	Jika terdapat <i>search engine</i> dalam <i>website</i> pemda untuk melakukan pencarian informasi keuangan	+1	+1
D	Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat <i>Internet Financial Reporting (IFR)</i> dalam <i>website</i> pemda	+1	+1
E	Jika data IFR dapat diunduh dalam format pdf. atau html.	+1	+1
F	Jika terdapat data IFR tahun sebelumnya dalam <i>website</i> pemerintah daerah (LKPD tahun 2015-2016)	+1	+1
G	Jika terdapat FAQ atau <i>contact person</i> seperti telepon/fax/email atau situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)		+1
H	Jika terdapat konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012		
	a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	+1	+1
	b. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)	+1	+1
	c. Rancangan Perda APBD	+1	+1
	d. Rancangan Perda Perubahan APBD	+1	+1
	e. Perda APBD	+1	+1
	f. Perda Perubahan APBD	+1	+1
	g. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	+1	+1
	h. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD	+1	+1
	i. Laporan Relaisasi Anggaran SKPD	+1	+1
	j. Laporan Realisasi Anggaran PPKD	+1	+1
	k. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit		
	9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	+1	+1
	10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	+1	+1
11. Neraca	+1	+1	
12. Laporan Operasional (LO)	+1	+1	
13. Laporan Arus Kas (LAK)	+1	+1	

INDEKS PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (lanjutan)

Poin	Syarat	Skor	
		2016	2017
	14. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	+1	+1
	15. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	+1	+1
	1. Opini BPK RI	+1	+1
	Total	23	25

Sumber: (Styles & Tennyson, 2007) dengan modifikasi

LAMPIRAN 3

SKORING INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING*

No.	Nama Pemda	A	B		C		D		E		F		G
			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	
NANGGROE ACEH DARUSSALAM													
1	Kab. Aceh Barat	1	1	1	1	1			1	1		1	1
2	Kab. Aceh Tengah	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
3	Kab. Bireuen	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
4	Kota Banda Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMATERA BARAT													
5	Kab. Lima Puluh Kota	1			1	1	1	1	1	1			1
JAMBI													
6	Kab. Batang Hari	1	1	1	1	1		1	1	1			1
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	1	1			1	1	1	1			1
RIAU													
8	Kab. Indragiri Hulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPULAUAN RIAU													
9	Kab. Lingga	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
10	Kota Batam	1			1	1			1	1	1		1
JAWA BARAT													
11	Kab. Bogor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Kab. Kuningan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Kab. Subang	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
14	Kota Bandung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Kota Bogor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Kota Depok	1	1	1	1	1			1	1		1	1
17	Kota Cimahi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BANTEN													
18	Kab. Tangerang	1	1	1	1	1		1	1	1			1
19	Kota Tangerang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JAWA TENGAH													
20	Kab. Banjarnegara	1			1	1		1		1	1	1	1
21	Kab. Banyumas	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
22	Kab. Blora	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
23	Kab. Boyolali	1					1	1	1	1	1	1	1
24	Kab. Cilacap	1	1	1			1	1	1	1	1		1
25	Kab. Jepara	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No.	Nama Pemda	A	B		C		D		E		F		G
			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	
26	Kab. Karangayar	1			1	1			1	1			1
27	Kab. Kebumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Kab. Klaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Kab. Kudus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Kab. Magelang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Kab. Pati	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1
32	Kab. Pekalongan	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
33	Kab. Pemalang	1	1	1			1		1	1	1	1	1
34	Kab. Purbalingga	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
35	Kab. Purworejo	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
36	Kab. Rembang	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
37	Kab. Sukoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
38	Kab. Temanggung	1			1	1			1	1	1	1	1
39	Kab. Wonogiri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Kab. Wonosobo	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
41	Kota Surakarta	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
42	Kota Semarang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Kota Pekalongan	1							1	1	1	1	1
44	Kota Magelang	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
45	Kota Tegal	1					1	1	1	1	1	1	1
DI YOGYAKARTA													
46	Kab. Bantul	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
47	Kab. Sleman	1		1		1	1	1	1	1			1
JAWA TIMUR													
48	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Kab. Blitar	1	1	1	1	1					1	1	1
50	Kab. Lumajang	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1
51	Kab. Sumenep	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
52	Kab. Trenggalek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	Kota Surabaya	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Kota Probolinggo	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
55	Kota Blitar	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
BALI													
56	Kab. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	Kab. Bangli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SKORING INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (lanjutan)

No.	Nama Pemda	A	B		C		D		E		F		G
			16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	
58	Kab. Jembrana	1	1	1			1	1	1	1		1	1
NUSA TENGGARA BARAT													
59	Kab. Lombok Barat	1			1	1	1	1	1	1		1	1
60	Kab. Sumbawa Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
61	Kab. Lombok Utara	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1
62	Kota Mataram	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
KALIMANTAN SELATAN													
63	Kab. Tanah Bumbu	1	1	1					1	1		1	1
GORONTALO													
64	Kab. Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SULAWESI SELATAN													
65	Kota Makassar	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
66	Kota Pare-Pare	1			1	1			1	1			1
SULAWESI BARAT													
67	Kab. Mamuju	1			1	1			1	1	1	1	1

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	H																																	
		16													17																				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k					
										1	2	3	4	5	6	7									1	2	3	4	5	6	7				
NAD																																			
1	Kab. Aceh Barat				1					1		1										1	1				1	1	1	1	1	1			
2	Kab. Aceh Tengah	1	1	1		1		1	1		1								1	1	1		1		1	1									
3	Kab. Bireuen									1				1																					
4	Kota Banda Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1		1	1	1	1				
SUMATERA BARAT																																			
5	Kab. Lima Puluh Kota			1		1		1	1												1		1	1	1	1	1		1		1				
JAMBI																																			
6	Kab. Batang Hari	1	1																	1	1						1	1	1	1	1				
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	1				1		1		1	1	1		1	1				1			1	1												
RIAU																																			
8	Kab. Indragiri Hulu									1		1		1																					
KEPULAUAN RIAU																																			
9	Kab. Lingga	1	1	1		1		1		1						1	1																		
10	Kota Batam	1	1			1	1	1	1		1							1	1			1	1			1	1								

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	H																																			
		16														17																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l
												1	2	3	4	5	6	7												1	2	3	4	5	6	7	
JAWA BARAT																																					
11	Kab. Bogor				1	1					1	1	1	1	1	1					1	1	1				1	1	1	1	1	1					
12	Kab. Kuningan				1				1	1	1	1	1	1	1	1		1				1				1	1	1				1					
13	Kab. Subang			1	1	1	1												1	1	1	1															
14	Kota Bandung		1			1	1												1	1	1		1		1	1											
15	Kota Bogor	1		1		1					1	1	1	1	1	1						1															
16	Kota Depok				1					1									1		1					1	1	1	1	1	1						
17	Kota Cimahi									1											1																
BANTEN																																					
18	Kab. Tangerang	1					1		1		1							1						1		1											
19	Kota Tangerang	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1			1		1		1	1			1				1						
JAWA TENGAH																																					
20	Kab. Banjarnegara	1	1							1			1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		1		1		1						
21	Kab. Banyumas				1	1				1		1	1	1	1		1		1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
22	Kab. Blora				1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
23	Kab. Boyolali				1					1	1	1		1			1	1			1		1	1		1		1									

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	H																																			
		16														17																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l
												1	2	3	4	5	6	7												1	2	3	4	5	6	7	
39	Kab. Wonogiri				1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1			
40	Kab. Wonosobo	1			1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1			
41	Kota Surakarta									1		1		1			1						1	1			1	1		1			1				
42	Kota Semarang									1		1		1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
43	Kota Pekalongan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
44	Kota Magelang	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1	1	1	1	1	1					
45	Kota Tegal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
DI YOGYAKARTA																																					
46	Kab. Bantul		1			1			1						1		1				1			1	1	1	1		1		1						
47	Kab. Sleman				1	1		1			1	1	1	1	1	1					1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						
JAWA TIMUR																																					
48	Kab. Banyuwangi	1	1	1		1		1	1		1							1		1		1	1		1												
49	Kab. Blitar	1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1	1	1	1	1	1						
50	Kab. Lumajang	1									1		1																								
51	Kab. Sumenep				1	1	1				1											1	1	1		1											
52	Kab. Trenggalek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
53	Kota Surabaya				1	1					1	1	1	1	1	1	1																				

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	H																																			
		16														17																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l
												1	2	3	4	5	6	7												1	2	3	4	5	6	7	
54	Kota Probolinggo	1	1			1	1	1	1		1	1		1		1	1	1			1	1	1	1													
55	Kota Blitar	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1						1	1	1	1	1	1		1	1									
BALI																																					
56	Kab. Badung					1	1					1		1	1							1	1				1	1		1	1						
57	Kab. Bangli	1	1					1				1								1	1			1													
58	Kab. Jembrana					1	1			1		1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1											
NUSA TENGGARA BARAT																																					
59	Kab. Lombok Barat	1				1						1										1					1	1	1	1	1	1	1	1			
60	Kab. Sumbawa Barat											1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1			
61	Kab. Lombok Utara					1	1					1		1																							
62	Kota Mataram	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1					
KALIMANTAN SELATAN																																					
63	Kab. Tanah Bumbu											1																			1						
GORONTALO																																					
64	Kab. Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	H																																			
		16														17																					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k							l
												1	2	3	4	5	6	7												1	2	3	4	5	6	7	
SULAWESI SELATAN																																					
65	Kota Makassar				1		1		1	1	1	1	1	1	1																						
66	Kota Pare-Pare	1	1		1	1	1	1												1		1	1				1		1		1						
SULAWESI BARAT																																					
67	Kab. Mamuju									1	1	1	1	1	1	1																					

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	Total 2016	Total 2017	Indeks 2016	Indeks 2017	Tanggal & Jam Akses
NAD						
1	Kab. Aceh Barat	6	15	0.26	0.60	21-Nov-18
2	Kab. Aceh Tengah	11	12	0.48	0.48	21-Nov-18
3	Kab. Bireuen	6	6	0.26	0.24	16-Nov-18
4	Kota Banda Aceh	20	20	0.87	0.80	21-Nov-18
SUMATERA BARAT						
5	Kab. Lima Puluh Kota	7	13	0.30	0.52	18-Nov-18
JAMBI						
6	Kab. Batang Hari	5	15	0.22	0.60	17-Nov-18
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	8	0.48	0.32	21-Nov-18
RIAU						
8	Kab. Indragiri Hulu	8	7	0.35	0.28	16-Nov-18
KEPULAUAN RIAU						
9	Kab. Lingga	12	6	0.52	0.24	21-Nov-18
10	Kota Batam	10	10	0.43	0.40	16-Nov-18
JAWA BARAT						
11	Kab. Bogor	13	16	0.57	0.64	15-Nov-18
12	Kab. Kuningan	15	12	0.65	0.48	15-Nov-18
13	Kab. Subang	8	10	0.35	0.40	15-Nov-18
14	Kota Bandung	8	13	0.35	0.52	15-Nov-18
15	Kota Bogor	14	8	0.61	0.32	15-Nov-18
16	Kota Depok	5	15	0.22	0.60	21-Nov-18
17	Kota Cimahi	6	8	0.26	0.32	15-Nov-18
BANTEN						
18	Kab. Tangerang	7	9	0.30	0.36	21-Nov-18
19	Kota Tangerang	16	13	0.70	0.52	16-Nov-18
JAWA TENGAH						
20	Kab. Banjarnegara	8	17	0.35	0.68	15-Nov-18
21	Kab. Banyumas	12	20	0.52	0.80	15-Nov-18
22	Kab. Blora	15	22	0.65	0.88	21-Nov-18
23	Kab. Boyolali	9	12	0.39	0.48	15-Nov-18
24	Kab. Cilacap	11	15	0.48	0.60	15-Nov-18

SKORING INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING (lanjutan)

No	Nama Pemda	Total 2016	Total 2017	Indeks 2016	Indeks 2017	Tanggal & Jam Akses
27	Kab. Kebumen	15	14	0.65	0.56	15-Nov-18
28	Kab. Klaten	21	15	0.91	0.60	15-Nov-18
29	Kab. Kudus	21	23	0.91	0.92	20-Nov-18
30	Kab. Magelang	20	20	0.87	0.80	20-Nov-18
31	Kab. Pati	9	17	0.39	0.68	17-Nov-18
32	Kab. Pekalongan	19	16	0.83	0.64	15-Nov-18
33	Kab. Pemalang	14	13	0.61	0.52	22-Nov-18
34	Kab. Purbalingga	17	8	0.74	0.32	20-Nov-18
35	Kab. Purworejo	11	16	0.48	0.64	15-Nov-18
36	Kab. Rembang	11	10	0.48	0.40	15-Nov-18
37	Kab. Sukoharjo	12	9	0.52	0.36	15-Nov-18
38	Kab. Temanggung	8	17	0.35	0.68	20-Nov-18
39	Kab. Wonogiri	14	21	0.61	0.84	16-Nov-18
40	Kab. Wonosobo	16	15	0.70	0.60	20-Nov-18
41	Kota Surakarta	8	13	0.35	0.52	20-Nov-18
42	Kota Semarang	11	22	0.48	0.88	20-Nov-18
43	Kota Pekalongan	20	19	0.87	0.76	16-Nov-18
44	Kota Magelang	20	19	0.87	0.76	20-Nov-18
45	Kota Tegal	14	16	0.61	0.64	16-Nov-18
DI YOGYAKARTA						
46	Kab. Bantul	9	16	0.39	0.64	16-Nov-18
47	Kab. Sleman	11	16	0.48	0.64	16-Nov-18
JAWA TIMUR						
48	Kab. Banyuwangi	12	13	0.52	0.52	21-Nov-18
49	Kab. Blitar	15	18	0.65	0.72	21-Nov-18
50	Kab. Lumajang	8	5	0.35	0.20	21-Nov-18
51	Kab. Sumenep	8	10	0.35	0.40	17-Nov-18
52	Kab. Trenggalek	23	25	1.00	1.00	21-Nov-18
53	Kota Surabaya	13	6	0.57	0.24	21-Nov-18
54	Kota Probolinggo	16	13	0.70	0.52	17-Nov-18
55	Kota Blitar	16	13	0.70	0.52	21-Nov-18
BALI						
56	Kab. Badung	10	13	0.43	0.52	21-Nov-18
57	Kab. Bangli	9	10	0.39	0.40	21-Nov-18
58	Kab. Jembrana	13	11	0.57	0.44	17-Nov-18

SKORING INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (lanjutan)

No	Nama Pemda	Total 2016	Total 2017	Indeks 2016	Indeks 2017	Tanggal & Jam Akses
NUSA TENGGARA BARAT						
59	Kab. Lombok Barat	6	17	0.26	0.68	22-Nov-18
60	Kab. Sumbawa Barat	11	13	0.48	0.52	22-Nov-18
61	Kab. Lombok Utara	10	5	0.43	0.20	17-Nov-18
62	Kota Mataram	17	17	0.74	0.68	17-Nov-18
KALIMANTAN SELATAN						
63	Kab. Tanah Bumbu	4	6	0.17	0.24	17-Nov-17
GORONTALO						
64	Kab. Gorontalo	22	23	0.96	0.92	17-Nov-18
SULAWESI SELATAN						
65	Kota Makassar	15	5	0.65	0.20	18-Nov-18
66	Kota Pare-Pare	8	10	0.35	0.40	18-Nov-18
SULAWESI BARAT						
67	Kab. Mamuju	10	5	0.43	0.20	18-Nov-18

LAMPIRAN 4

DAFTAR DATA VARIABEL

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independen							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
1	Kab. Aceh Barat	2016	1	0	60	0.45	197,921	69.26	31,244,789.59	0.26
2	Kab. Aceh Barat	2017	1	0	61	0.42	201,680	70.20	34,425,823.09	0.60
3	Kab. Aceh Tengah	2016	1	0	60	0.40	200,412	72.04	31,470,171.45	0.48
4	Kab. Aceh Tengah	2017	1	0	61	0.40	204,270	72.19	32,907,426.45	0.48
5	Kab. Bireuen	2016	1	0	17	0.44	443,627	70.21	24,177,969.33	0.26
6	Kab. Bireuen	2017	1	0	18	0.38	453,220	71.11	25,170,998.63	0.24
7	Kota Banda Aceh	2016	1	1	60	0.46	254,904	83.73	62,039,042.15	0.87
8	Kota Banda Aceh	2017	1	1	61	0.48	259,910	83.95	64,668,539.11	0.80
9	Kab. Lima Puluh Kota	2016	1	0	60	0.65	372,568	68.37	34,026,003.31	0.30
10	Kab. Lima Puluh Kota	2017	1	0	61	0.59	376,072	68.69	36,620,647.11	0.52
11	Kab. Batang Hari	2016	1	0	60	0.57	263,896	68.70	50,580,531.72	0.22
12	Kab. Batang Hari	2017	1	0	61	0.52	266,971	68.92	55,095,871.84	0.60
13	Kab. Tanjung Jabung Timur	2016	0	0	17	0.49	215,316	61.88	86,663,322.74	0.48
14	Kab. Tanjung Jabung Timur	2017	1	0	18	0.51	216,777	62.61	97,062,880.29	0.32

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
15	Kab. Indragiri Hulu	2016	1	0	60	0.45	417,733	68.67	88,647,533.23	0.35
16	Kab. Indragiri Hulu	2017	1	0	61	0.43	425,897	68.97	90,956,264.07	0.28
17	Kab. Lingga	2016	0	0	13	0.55	88,971	62.44	36,910,903.55	0.52
18	Kab. Lingga	2017	1	0	14	0.55	89,330	63.45	41,106,011.42	0.24
19	Kota Batam	2016	1	1	17	0.26	1,236,399	79.79	105,591,318.01	0.43
20	Kota Batam	2017	1	1	18	0.27	1,283,196	80.26	107,129,386.31	0.40
21	Kab. Bogor	2016	1	0	66	0.32	5,587,390	68.32	33,038,860.72	0.57
22	Kab. Bogor	2017	1	0	67	0.27	5,715,009	69.13	35,238,264.72	0.64
23	Kab. Kuningan	2016	1	0	66	0.50	1,061,886	67.51	17,481,160.88	0.65
24	Kab. Kuningan	2017	1	0	67	0.46	1,068,201	67.78	19,169,613.21	0.48
25	Kab. Subang	2016	0	0	48	0.51	1,546,000	67.14	20,368,693.40	0.35
26	Kab. Subang	2017	0	0	49	0.68	1,562,509	67.73	21,866,754.05	0.40
27	Kota Bandung	2016	0	1	66	0.46	2,490,622	70.69	87,072,225.33	0.35
28	Kota Bandung	2017	0	1	67	0.35	2,497,938	71.02	96,123,282.48	0.52
29	Kota Bogor	2016	1	1	66	0.32	1,064,687	74.50	33,250,147.70	0.61
30	Kota Bogor	2017	1	1	67	0.35	1,081,009	75.16	35,620,424.99	0.32
31	Kota Depok	2016	1	1	17	0.35	2,179,813	79.60	24,465,860.14	0.22
32	Kota Depok	2017	1	1	18	0.30	2,254,513	79.83	25,878,759.63	0.60

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
33	Kota Cimahi	2016	1	1	15	0.48	594,021	76.69	41,350,389.97	0.26
34	Kota Cimahi	2017	1	1	16	0.40	601,099	76.95	44,142,479.03	0.32
35	Kab. Tangerang	2016	1	0	66	0.25	3,477,495	70.44	31,443,323.43	0.30
36	Kab. Tangerang	2017	1	0	67	0.22	3,584,770	70.97	33,277,727.72	0.36
37	Kota Tangerang	2016	1	1	23	0.26	2,093,706	76.81	65,001,963.03	0.70
38	Kota Tangerang	2017	1	1	24	0.22	2,139,891	77.01	69,825,986.46	0.52
39	Kab. Banjarnegara	2016	1	0	66	0.53	907,410	65.52	18,993,619.20	0.35
40	Kab. Banjarnegara	2017	1	0	67	0.44	912,917	65.86	20,768,591.23	0.68
41	Kab. Banyumas	2016	1	0	66	0.49	1,650,625	70.49	25,455,206.36	0.52
42	Kab. Banyumas	2017	1	0	67	0.43	1,665,025	70.75	27,378,567.89	0.80
43	Kab. Blora	2016	1	0	66	0.51	855,573	66.61	23,369,133.90	0.65
44	Kab. Blora	2017	1	0	67	0.46	858,865	67.52	25,378,843.01	0.88
45	Kab. Boyolali	2016	1	0	66	0.52	969,325	72.18	26,752,637.14	0.39
46	Kab. Boyolali	2017	1	0	67	0.47	974,579	72.64	29,243,396.38	0.48
47	Kab. Cilacap	2016	1	0	66	0.50	1,703,390	68.60	58,058,342.48	0.48
48	Kab. Cilacap	2017	1	0	67	0.44	1,711,627	68.90	61,736,581.63	0.60
49	Kab. Jepara	2016	1	0	66	0.47	1,205,800	70.25	19,845,745.56	0.22
50	Kab. Jepara	2017	1	0	67	0.45	1,223,198	70.79	21,145,391.02	0.68

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
51	Kab. Karangayar	2016	1	0	66	0.50	864,021	74.90	33,936,675.15	0.26
52	Kab. Karangayar	2017	1	0	67	0.48	871,596	75.22	36,461,847.00	0.32
53	Kab. Kebumen	2016	0	0	66	0.48	1,188,603	67.41	18,774,140.73	0.65
54	Kab. Kebumen	2017	1	0	67	0.45	1,192,007	68.29	20,107,264.47	0.56
55	Kab. Klaten	2016	0	0	66	0.53	1,163,218	73.97	27,129,910.30	0.91
56	Kab. Klaten	2017	0	0	67	0.48	1,167,401	74.25	29,288,136.64	0.60
57	Kab. Kudus	2016	1	0	66	0.44	841,499	72.94	106,871,190.58	0.91
58	Kab. Kudus	2017	1	0	67	0.41	851,478	73.84	114,524,391.70	0.92
59	Kab. Magelang	2016	1	0	66	0.53	1,257,123	67.85	20,768,850.78	0.87
60	Kab. Magelang	2017	1	0	67	0.47	1,268,396	68.39	22,110,602.68	0.80
61	Kab. Pati	2016	1	0	66	0.49	1,239,989	69.03	27,283,306.55	0.39
62	Kab. Pati	2017	1	0	67	0.43	1,246,691	70.12	29,359,319.99	0.68
63	Kab. Pekalongan	2016	1	0	66	0.52	880,092	67.71	20,698,972.38	0.83
64	Kab. Pekalongan	2017	1	0	67	0.44	886,197	68.40	22,300,910.52	0.64
65	Kab. Pemasang	2016	1	0	66	0.57	1,292,609	64.17	15,501,207.25	0.61
66	Kab. Pemasang	2017	1	0	67	0.50	1,296,281	65.04	16,835,855.81	0.52
67	Kab. Purbalingga	2016	1	0	66	0.51	907,507	67.48	21,999,830.30	0.74
68	Kab. Purbalingga	2017	1	0	67	0.45	916,427	67.72	23,424,669.94	0.32
69	Kab. Purworejo	2016	1	0	66	0.45	712,686	70.66	20,999,430.32	0.48
70	Kab. Purworejo	2017	1	0	67	0.44	714,574	71.31	22,537,903.70	0.64

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independen							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
71	Kab. Rembang	2016	0	0	66	0.50	624,096	68.60	23,821,655.64	0.48
72	Kab. Rembang	2017	0	0	67	0.44	628,922	68.95	25,780,621.44	0.40
73	Kab. Sukoharjo	2016	1	0	66	0.50	871,397	75.06	33,417,604.15	0.52
74	Kab. Sukoharjo	2017	1	0	67	0.44	878,374	75.56	24,721,815.54	0.36
75	Kab. Temanggung	2016	1	0	66	0.48	752,486	67.60	23,341,298.04	0.35
76	Kab. Temanggung	2017	1	0	67	0.45	759,128	68.34	24,808,727.91	0.68
77	Kab. Wonogiri	2016	1	0	66	0.56	951,975	68.23	24,472,281.31	0.61
78	Kab. Wonogiri	2017	1	0	67	0.49	954,706	68.66	26,291,863.67	0.84
79	Kab. Wonosobo	2016	1	0	66	0.53	780,793	66.19	19,658,219.27	0.70
80	Kab. Wonosobo	2017	1	0	67	0.45	784,207	66.89	20,766,200.76	0.60
81	Kota Surakarta	2016	1	1	66	0.49	514,171	80.76	73,498,894.34	0.35
82	Kota Surakarta	2017	1	1	67	0.46	516,102	80.85	79,569,542.45	0.52
83	Kota Semarang	2016	1	1	66	0.30	1,729,083	81.19	84,828,200.84	0.48
84	Kota Semarang	2017	1	1	67	0.30	1,757,686	82.01	91,737,659.63	0.88
85	Kota Pekalongan	2016	1	1	66	0.53	299,222	73.32	28,433,738.16	0.87
86	Kota Pekalongan	2017	1	1	67	0.49	301,870	73.77	30,768,211.48	0.76
87	Kota Magelang	2016	1	1	66	0.53	121,112	77.16	57,921,593.24	0.87
88	Kota Magelang	2017	1	1	67	0.48	121,474	77.84	62,885,885.05	0.76
89	Kota Tegal	2016	0	1	62	0.47	247,212	73.55	48,209,633.84	0.61
90	Kota Tegal	2017	0	1	63	0.47	248,094	73.95	52,431,739.58	0.64

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
91	Kab. Bantul	2016	1	0	66	0.50	982,201	78.42	21,309,283.94	0.39
92	Kab. Bantul	2017	1	0	67	0.47	995,639	78.67	22,733,139.22	0.64
93	Kab. Sleman	2016	1	0	66	0.44	1,180,908	82.15	31,281,014.27	0.48
94	Kab. Sleman	2017	1	0	67	0.38	1,214,346	82.85	33,011,184.62	0.64
95	Kab. Banyuwangi	2016	1	0	66	0.50	1,599,811	69.00	41,472,398.93	0.52
96	Kab. Banyuwangi	2017	1	0	67	0.50	1,604,897	69.64	45,015,972.99	0.52
97	Kab. Blitar	2016	1	0	66	0.50	1,149,710	68.88	25,515,999.69	0.65
98	Kab. Blitar	2017	1	0	67	0.48	1,153,803	69.33	27,435,359.42	0.72
99	Kab. Lumajang	2016	1	0	66	0.54	1,033,698	63.74	25,784,126.51	0.35
100	Kab. Lumajang	2017	0	0	67	0.50	1,036,823	64.23	27,684,571.04	0.20
101	Kab. Sumenep	2016	0	0	66	0.54	1,076,805	63.42	26,904,592.75	0.35
102	Kab. Sumenep	2017	1	0	67	0.51	1,081,204	64.28	28,282,359.30	0.40
103	Kab. Trenggalek	2016	1	0	66	0.55	691,295	67.78	21,576,895.54	1.00
104	Kab. Trenggalek	2017	1	0	67	0.49	693,104	68.10	23,253,364.57	1.00
105	Kota Surabaya	2016	1	1	66	0.18	2,862,406	80.38	157,693,562.69	0.57
106	Kota Surabaya	2017	1	1	67	0.15	2,874,699	81.07	172,206,898.88	0.24
107	Kota Probolinggo	2016	0	1	66	0.53	231,112	71.50	38,457,544.39	0.70
108	Kota Probolinggo	2017	1	1	67	0.58	233,123	72.09	41,523,144.43	0.52
109	Kota Blitar	2016	1	1	66	0.51	139,117	76.71	38,320,262.80	0.70
110	Kota Blitar	2017	1	1	67	0.49	139,995	77.10	41,444,337.30	0.52

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
111	Kab. Badung	2016	1	0	58	0.08	630,000	79.80	74,947,619.05	0.43
112	Kab. Badung	2017	1	0	59	0.07	643,500	80.54	81,325,563.33	0.52
113	Kab. Bangli	2016	1	0	58	0.55	223,800	67.03	24,436,997.32	0.39
114	Kab. Bangli	2017	1	0	59	0.51	225,100	68.24	26,810,306.53	0.40
115	Kab. Jembrana	2016	1	0	58	0.52	273,300	70.38	40,947,676.55	0.57
116	Kab. Jembrana	2017	1	0	59	0.47	274,900	70.72	44,397,962.90	0.44
117	Kab. Lombok Barat	2016	1	0	58	0.53	665,132	65.55	19,002,243.16	0.26
118	Kab. Lombok Barat	2017	1	0	59	0.45	675,222	66.37	20,677,643.80	0.68
119	Kab. Sumbawa Barat	2016	1	0	13	0.34	137,072	69.26	187,543,772.62	0.48
120	Kab. Sumbawa Barat	2017	1	0	14	0.32	140,890	70.08	170,764,426.15	0.52
121	Kab. Lombok Utara	2016	1	0	8	0.49	214,393	64.89	18,498,738.30	0.43
122	Kab. Lombok Utara	2017	1	0	9	0.43	216,515	65.84	20,067,893.68	0.20
123	Kota Mataram	2016	1	1	24	0.44	459,314	77.20	32,235,028.76	0.74
124	Kota Mataram	2017	1	1	25	0.42	468,509	77.84	35,280,005.29	0.68
125	Kab. Tanah Bumbu	2016	1	0	24	0.32	334,314	68.28	49,531,278.98	0.17
126	Kab. Tanah Bum	2017	1	0	25	0.35	343,193	69.12	52,072,740.41	0.24

DAFTAR DATA VARIABEL (lanjutan)

No.	Nama Pemda	Tahun	Variabel Independden							Var. Dependen
			OP	TYPE	AGE	DEPEND	SIZE	IPM	PDRB/Kapita	INDEKS
127	Kab. Gorontalo	2016	1	0	57	0.53	372,856	64.22	26,803,913.58	0.96
128	Kab. Gorontalo	2017	1	0	58	0.52	374,923	64.95	29,045,964.10	0.92
129	Kota Makassar	2016	1	1	57	0.37	1,469,601	80.53	87,392,428.28	0.65
130	Kota Makassar	2017	1	1	58	0.38	1,489,011	81.13	96,123,534.35	0.20
131	Kota Pare-Pare	2016	1	1	57	0.50	140,423	76.48	39,473,590.51	0.35
132	Kota Pare-Pare	2017	1	1	58	0.51	142,097	76.68	43,005,834.04	0.40
133	Kab. Mamuju	2016	0	0	57	0.59	272,260	65.65	33,387,203.41	0.43
134	Kab. Mamuju	2017	1	0	58	0.57	279,393	66.32	35,977,995.15	0.20

LAMPIRAN 5

HASIL UJI STATISTIK SPSS

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

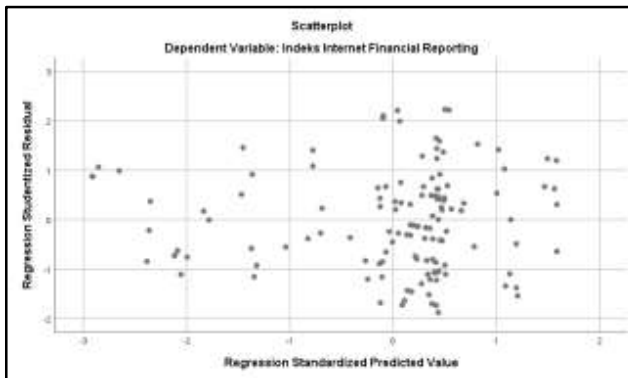
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Opini Audit	.878	1.139
	Tipe Pemda	.452	2.215
	Umur Administratif	.745	1.343
	Tingkat Ketergantungan	.442	2.261
	Jumlah Penduduk	.638	1.567
	IPM	.377	2.656
	Tingkat Kesejahteraan	.577	1.733

a. Dependent Variable: Indeks IFR

2. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.01102
Cases < Test Value	67
Cases >= Test Value	67
Total Cases	134
Number of Runs	59
Z	-1.561
Asymp. Sig. (2-tailed)	.119
a. Median	

3. Uji Heterokedastisitas



4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19188438
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.039
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 ^a	.122	.073	.19697	1.530
a. Predictors: (Constant), PDRB Per Kapita, Opini Audit, Jumlah Penduduk, Umur Administratif, Tipe Pemda, Tingkat Ketergantungan, IPM					
b. Dependent Variable: Indeks IFR					

2. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.737	.960		.768	.444
	Opini Audit	.036	.055	.059	.663	.509
	Tipe Pemda	.072	.057	.157	1.260	.210
	Umur Administratif	.004	.001	.324	3.345	.001
	Tingkat Ketergantungan	.077	.253	.038	.303	.762
	Jumlah Penduduk	-.022	.055	-.042	-.399	.690
	IPM	.000	.005	.010	.076	.939
	Tingkat Kesejahteraan	-.053	.092	-.064	-.582	.561
a. Dependent Variable: Indeks IFR						